

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD AMIL GOVERNANCE* DI LEMBAGA  
AMIL ZAKAT**

(Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah**



**Oleh :**

**KHARISMA APRILIYANI**

**NIM. 16.52.21.093**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
2020**

ANALISIS PENERAPAN *GOOD AMIL GOVERNANCE* DI LEMBAGA  
AMIL ZAKAT

(Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)

SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna  
Memperleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

KHARISMA APRILIYANI

NIM. 16.52.21.093

Surakarta, 25 November 2020

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dita Andraeny, M.Si

NIP.19880628 201403 2 005

SURAT PERYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : KHARISMA APRILIYANI  
NIM : 165221093  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "ANALISIS PENERAPAN *GOOD AMIL GOVERNANCE* DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksisesui peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamu'alaikum Wr,Wb

Surakarta 25 November 2020  
  
Kharisma Apriliyani

#### SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : KHARISMA APRILIYANI

NIM : 165221093

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN *GOOD AMIL GOVERNANCE* DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)”.

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian di Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten dan pengambilan data dari wawancara dengan amil zakat Dompot Sejuta Harapan (DSH). Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 25 November 2020

  
Kharisma Apriliyani

Dita Andraeny, M.Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Kharisma Apriliyani

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Di Surakarta  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersamaan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan perlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Kharisma Apriliyani NIM : 165221093 yang berjudul:

“ANALISIS PENERAPAN *GOOD AMIL GOVERNANCE* DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)”.

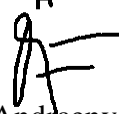
Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 25 Novemeber 2020

Dosen Pembimbing Skripsi



Dita Andraeny, M.Si

NIP.19880628 201403 2 005

**PENGESAHAN**

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD AMIL GOVERNANCE* DI LEMBAGA AMIL ZAKAT  
(Studi pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)**

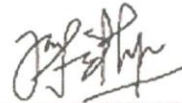
Oleh:

**KHARISMA APRILIYANI**  
**NIM. 16.52.21.093**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah  
Pada hari Senin tanggal 21 Desember / 6 Jumadil Ula 1442 dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelas Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Dewi Nurulitasari, M.Si.  
NIP 19890717 201903 2 019



Penguji II  
Fitri Laela Wijayanti, S.E., M.Si.Ak.  
NIP 19860625 201403 2 001



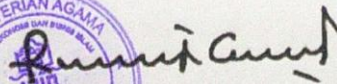
Penguji III  
Helti Nur Aisyiah, M.Si.  
NIK 19900607 201701 2 133



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Surakarta



  
Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si.  
NIP 19720304 200112 1 004

## MOTTO

*“Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”*

(Abu Hurairah)

*”Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar”*

(Umar bin Khaththab)

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”*

(Q.S Al- Insyirah: 6-8)

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesamanya.” (Nabi Muhammad SAW)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobil'amin

Kupersembahkan karya ini untuk,

Bapak dan Ibu serta Adik yang senantiasa mendo'akan, dan memberikan banyak  
motivasi

Serta untuk teman-teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu  
persatu

Terimakasih dan Jazakumullahu Khairan Katsiiran



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ ANALISIS PENERAPAN *GOOD AMIL GOVERNANCE* (GAG) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi pada Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, M.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Anim Rahmayati, S.E.I,M.Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

4. Dita Andraeny, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing dalam penyelesaian skripsi.
5. Segenap Dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan telah banyak membantu penulis selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
6. Dompok Sejuta Harpan (DSH) Klaten atas waktu, tenaga, pikiran serta telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Bapak, Ibu dan adik serta keluarga yang telah senantiasa mendo'akan penulis.
8. Keluarga Kecilku As-Saff yang telah memberikan saya banyak ilmu dan motivasi dalam berjuang.
9. Teman seperjuangan HAARASHI (Halim, Sinta. Afi, Nuril, Rahma, Dewi, Alifah) yang telah mengajarkan arti sebuah perjuangan dan kesabaran.
10. Desynta Anjani dan Tri Widyaningsih yang telah memberikan banyak motivasi, dan dukungannya.
11. Teman-teman Akuntansi Syariah C angkatan 2016 yang telah memberikan warna dan kebersamaan selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang berjasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tiada kiranya bisa membalasnya hanya rasa syukur serta do'a yang selalu terucap meminta kepada-Nya, dan semoga kebbaikannya dibalas oleh Allah SWT, *jazakumullah*

Wassalmu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 25 November 2020

Kharisma Apriliyani  
NIM:165221093

## ***ABSTRACT***

This study aims to determine the implementation of good amil governance in the Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten. The descriptive qualitative research method is used to describe the process of managing the amil zakat institution using nine instruments, namely transparency, accountability, responsibility, independence, integrity justice, reliability, competence, reputation. The research data was obtained through documentation and interviews with the Director, Human Resources of Development (HRD) and the Finance Department.

The results of this study indicate that the Dompot Sejuta Harapan (DSH) has not been maximal in implementing institutional governance, especially in the Transparency and Independent instruments.

Keywords: Good Amil Governance

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tata kelola amil yang baik yang ada di Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menjabarkan proses dalam melakukan tata kelola lembaga amil zakat dengan menggunakan sembilan instrument yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independen, keadilan integritas, keandalan, kompetensi, reputasi. Data penelitian inididapatkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan Direktur,Human resord of development (HRD) serta Bagian Keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dompot Sejuta Harapan (DSH) belum maksimal dalam menerapkan tata kelola lembaga khususnya di instrumenTransparansi dan Independen.

Kata Kunci:Tata Kelola Amil yang Baik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS .....	v
PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah .....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian .....	5
1.6 Manfaat Penelitian .....	5
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi .....	6

BAB II LANDASAN TEORI .....	8
2.1 Kajian Teori .....	8
2.1.1 Pengertian Zakat.....	8
2.1.2 <i>Good Amil Governance</i> Di Lembaga Amil Zakat .....	9
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian.....	28
3.2 Jenis Penelitian.....	28
3.3 Subyek Penelitian.....	29
3.4 Data dan Sumber Data .....	29
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.7 Validitas dan Reliabilitas Data.....	33
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Profil Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten .....	34
4.2 Penerapan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shdaqah (ZIS) Berdasarkan Prinsip <i>Good Amil Governance</i> (GAG) di Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten .....	36
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	60
5.3 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN.....	63

## DAFTAR TABEL

3.1	Indikator <i>Good Amil Governance</i> .....	31
4.1	Media Informasi dan Komunikasi Digital DSH .....	38
4.2	Data Penghimpunan Dana .....	54
4.3	Ringkasan Penerapan <i>Good Amil Governance</i> di Lembaga Amil Zakat Dompet Sejuta Harapan (DSH) Klaten.....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Jadwal Penelitian .....	64
Lampiran 2	: Panduan Wawancara .....	65
Lampiran 3	: Surat Izin Penelitian .....	70
Lampiran 4	: Hasil Wawancara Dengan Direktur DSH.....	71
Lampiran 5	: Hasil Wawancara Dengan HRD DSH .....	81
Lampiran 6	: Hasil Wawancara Dengan Bagian Keuangan DSH.....	85
Lampiran 7	: Standar Operasional Pelayanan Prima.....	87
Lampiran 8	: Penerima Manfaat DSH.....	92
Lampiran 9	: SK Penetapan Sebagai Anggota Forum Organisasi Zakat .....	93
Lampiran 10	: Foto.....	94
Lampiran 11	: Surat Telah Melakukan Penelitian.....	97
Lampiran 12	:Daftar Riwayat Hidup.....	98

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan terkait konsep tata kelola yang baik (*good governance*) dalam menjalankan sebuah organisasi telah menjadi sebuah perhatian penting selama beberapa dekade terakhir bagi organisasi di seluruh dunia, baik dari organisasi sektor privat maupun sektor publik yang terdiri atas organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba. Perhatian tersebut kemudian melahirkan berbagai macam pedoman tata kelola dari para pembuat standar yang kemudian diterapkan oleh berbagai organisasi untuk membantu, memperbaiki, menjamin terpenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan serta tujuan organisasi. Pedoman tata kelola tersebut pada umumnya terdiri atas lima prinsip utama, yaitu upaya dalam memberikan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (Hasbar & Kurnia, 2016).

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan untuk tetap menjaga kepercayaan semua *stakeholder* (Efendi, 2001 dalam Alyani, 2018). *Good Corporate Governance* yang efektif dapat dilakukan melalui kerjasama yang baik antara lembaga/badan pengelola zakat, pemerintah, dan masyarakat (Wahjuni dkk, 2019).

Konsep prinsip *Good Amil Governance* (GAG) merupakan sebuah pengembangan dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang dipergunakan khusus dalam mengukur dan menilai tata kelola kinerja Lembaga

Pengelola Zakat (LPZ) dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), secara profesional dalam memperkuat kepercayaan dari para *stakeholder* (muzakki), sehingga manfaat yang diberikan kepada penerima zakat (mustahik) akan semakin besar dan maksimal. Penerapan prinsip *Good Amil Governance* juga sebagai sebuah langkah dan upaya untuk merealisasikan *Zakat Core Principle* pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) (Yulianti, 2016). Dalam *good amal governance* yang menjadi acuan adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keadilan, ditambah dengan orientasi masalah dan hukum syariah. Asas *good amal governance* bersumber dari asas yang ada dalam *good governance*, selain asas masalah dan hukum syariah. (Chotib, 2018).

Salah satu informasi penting yang perlu diketahui oleh publik (khususnya para donatur) antara lain laporan keuangan Lembaga Amil Zakat. Laporan keuangan merupakan salah satu produk yang dapat meningkatkan akuntabilitas sebuah lembaga amil zakat, karena dengan laporan keuangan para pemangku kepentingan lembaga amil zakat akan dapat memantau aliran dana yang sudah diberikan kepada sebuah Lembaga Amil Zakat. (Adha, 2012).

Hendian (2016) menyebutkan bahwa penerapan nilai GCG di Lembaga Amil Zakat sangat penting dilakukan terutama terkait laporan keuangan organisasi pengelola zakat yang menjadi tolak ukur sejauh mana *management* zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat. Karena dalam islam tujuan dari pelaporan keuangan adalah pertanggung jawaban baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunaian zakat.

Dari segi lembaga pengelolaan zakat, maka penerapan GCG sangat penting untuk diterapkan di Lembaga Amil Zakat, terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan GCG di Lembaga Amil Zakat penelitian. Alyani (2018) menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa telah melaksanakan *Good Corporate Governanced* dengan baik terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemadirian, dan kewajaran.

Penelitian Kurniasari (2017) menyimpulkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta yang meliputi Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat telah mengimplementasikan kelima prinsip GCG yang terdiri dari *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independent*, dan *Fairness*. Tetapi penerapannya secara umum masih terdapat beberapa kekurangan karena ada beberapa OPZ yang belum menerapkan prinsip tersebut dengan baik.

Penelitian Endryana (2016) menyimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta sudah melaksanakan prinsip tersebut secara keseluruhan. Walaupun di dalam transparansi yang terdapat dalam peraturannya menyebutkan untuk hal pelaporan juga melibatkan pemerintah daerah selaku penerima laporan. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah belum memberikan kejelasan kepada lembaga-lembaga yang mengurus dan zakat, infaq, dan sedekah, kemana mereka harus melaporkan segala kegiatannya.

Penelitian Wahjuni dkk (2019) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerapan *good corporate governance* pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional. Adanya perbedaan penerapan *good*

*corporate governance* tersebut disebabkan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keadilan, dan independen telah diterapkan dengan baik oleh Badan Amil Zakat Nasional dibandingkan pada Lembaga Amil Zakat Nasional.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sebuah Organisasi Pengelola Zakat sangat diperlukan dan berperan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan demikian organisasi tersebut dapat berkembang dengan baik dan amanah. (Kurniasari, 2017). Dengan diterapkannya tata kelolaamil yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan penghimpunan zakat yang lebih maksimal serta penyalurannya lebih tepat sasaran dan bermakna serta produktif. (Chotib, 2018).

Penelitian ini akan dilakukan di lembaga amil zakat Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten. Alasan mengambil obyek penelitian ini adalah karena berdasarkan penelitian Desi Rahmawati (2019) terkait tingkat efisiensi di lembaga zakat khususnya di Dompot Sejuta Harapan (DSH) yang menghasilkan bahwa Dompot Sejuta Harapan (DSH) mengalami tingkat efisien 100%, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Penerapan *Good Amil Governance* di Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis melakukan identifikasi masalah bahwa di Indonesia masih terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum menerapkan secara maksimal dalam penerapan *Good Amil Governance*

dengan berbagai permasalahan yang berbeda antar lembaga zakat satu dengan yang lainnya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mencari tahu “Analisis Penerapan *Good Amil Governance* di Lembaga Amil Zakat”.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini memerlukan adanya batasan masalah agar tidak melebar dengan menganalisis satu Lembaga Amil Zakat Dompot Sejuta Harapan (DSH) di Klaten, untuk mengetahui apakah lembaga tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* (GAG).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan *Good Amil Governance* di Lembaga Amil Zakat Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Good Amil Governance* di Lembaga Amil Zakat.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Lembaga Amil Zakat, diharapkan mampu dijadikan sebagai evaluasi apabila terdapat kekurangan dalam melakukan tata kelola sebuah lembaga.

### **1.7 Sistematika Penulisan Skripsi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri atas kajian teoritis dan hasil penelitian yang relevan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, subyek penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data, metode analisis data, validitas dan reliabilitas data.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, pembahasan hasil analisis, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian serta memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian lainnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuai itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka berarti orang itu baik (Qardawi, 2004). Secara terminologi istilah zakat merupakan sebuah aktivitas kehidupan seorang muslim dalam melaksanakan kewajiban yang di syariatkan dalam agama untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki secara penuh dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima dalam ketentuan Al-Qur'an (Wasilah et al., 2009).

Zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). (Outlook Zakat 2017). Dalam menyalurkan zakat Allah sudah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut.

" Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (Mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah (Fisabilillah), dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana". (QS 9:60).

### **2.1.2      *Good Amil Governance Di Lembaga Amil Zakat***

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAB I pasal 3 menyatakan pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Lembaga Amil Zakat dapat melakukan tugas pengelolaan zakat dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Beberapa azas Lembaga Pengelola Zakat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

1. Syariat Islam

Dalam menjalankan perannya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus berlandaskan syariat Islam.

2. Amanah

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus menjadi organisasi yang amanah atau dapat dipercaya.

3. Kemanfaatan

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus menjadi organisasi yang bermanfaat bagi muzakki maupun mustahik.

#### 4. Keadilan

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus berlaku adil dalam pendistribusian dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).

#### 5. Kepastian hukum

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus mempunyai legalitas dari pemerintah.

#### 6. Terintegrasi

Dalam penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) haruslah dilakukan secara hierarki.

#### 7. Akuntabilitas

Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik) serta informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dapat diakses dengan mudah.

LAZ tergolong ke dalam organisasi atau Lembaga Keuangan Islam Publik yang mengelola dan mendistribusikan dana publik, maka LAZ juga harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang zakat bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (Budiman, 2012 dalam Permana & Baehaqi, 2018). Untuk mengoptimalkan ZIS sangatlah dipengaruhi oleh kualitas manajemen LAZ. Maka penerapan prinsip tata

kelola yang baik (*good governance*) diperlukan (Mahmudi, 2009 dalam Permana & Baehaqi, 2018).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan bahwa asas GCG yang harus dipastikan pelaksanaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulianti pada tahun 2016 menjelaskan bahwa prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang dipandang sebagai prinsip yang baik dalam tata kelola sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Sedangkan prinsip *Good Amil Governance (GAG)*, dirumuskan dengan maksud untuk mendorong tercapainya optimalitas dan profesionalitas Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sebagai lembaga publik yang bertanggungjawab penuh dalam mengelola dana umat Islam berupa Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) (Yulianti, 2016).

Maka hal tersebut perlu diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh para Amil Zakat dalam menciptakan tata kelola di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) secara sehat, baik dan benar sesuai dengan aturan syari'at dan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip *Good Amil Governance (GAG)* tersebut berupa: *transparency* (keterbukaan), *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan).

Adapun penjelasan dari hasil penelitian tersebut diatas, terkait dengan prinsip *Good Amil Governance (GAG)* pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam

pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) adalah sebagai berikut (Yulianti, 2016):

#### A. Transparansi

Transparansi (*Transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, perusahaan mitra, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lainnya. (KNKG, 2006)

Transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Hal tersebut sangat penting bagi muzaki dan merupakan hak muzaki untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal penting terkait kinerja Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). (Yulianti, 2016)

Transparansi LAZ bisa diwujudkan dengan memberikan laporan tertulis (tahunan dan bulanan). Laporan tersebut sebagai pelaksana tugasnya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, wujud dari kewajiban pertanggungjawaban dan kedisiplinan sebagai lembaga pengelola zakat. Disamping

itu sistem laporan keuangan juga harus dilakukan setiap bulan, yang sebelumnya diadakan rapat (bulanan) mengenai kegiatan yang sudah terlaksana (Permana & Baehaqi, 2018)

Dalam menerapkan prinsip transparansi, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap prinsip tersebut. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip transparansi disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator transparansi sebagai berikut (Yulianti, 2016).

1. Rencana kerja tahunan
2. Laporan keuangan berkala triwulanan
3. Laporan keuangan berkala tengah tahunan
4. Laporan keuangan berkala tahunan
5. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi Teknologi Informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
6. Sistem manajemen informasi
7. Laporan kegiatan dan keuangan insidental
8. Informasi penting tentang kegiatan insidental

KNKG memberikan pedoman untuk mengukur tingkat transparansi suatu perusahaan atau organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secaratepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

2. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
3. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## B. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*Accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung-jawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. (KNKG, 2006)

Akuntabilitas merupakan prinsip *Good Corporate* yang bermakna bahwa LAZ harus memegang prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana ZIS yang diterimanya. Prinsip akuntabilitas menekankan adanya kejelasan pola pertanggungjawaban (*pattern of accountability*), yaitu kepada siapa atau pihak mana LAZ akan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Akuntabilitas keuangan LAZ diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 29 dengan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana keagamaan lain secara berkala, sebelum itu juga dalam KMA Depag. RI No. 581 tahun 1999 tentang

pelaksanaan teknis atas ketersediaan audit keuangan lembaga, dan teknis penulisan laporan keuangan juga diatur dalam PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat.

Akuntabilitas LAZ setidaknya dapat ditunjukkan dengan menaati pilar-pilar aturan pokok terkait dengan zakat, yaitu aturan agama, aturan undang-undang, dan aturan pelaporan keuangan. Menaati aturan-aturan pokok dalam aktivitas kelembagaan secara langsung juga membentuk penerapan budaya good governance. Akuntabilitas LAZ dapat diwujudkan dengan mengacu pada 3 (tiga) pilar: agama (hukum syariah), pemerintah (undang-undang negara), dan pelaporan keuangan (PSAK) (Permana & Baehaqi, 2018).

Menurut Yulianti, 2016 menjelaskan indikator yang perlu penerapan serius adalah sistem pengendalian internal yang efektif, sebagai suatu komite audit dan manajemen risiko dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut penting, karena hasil komite audit harus disampaikan kepada semua pengurus secara jelas, agar dapat lebih dipahami dan dijadikan dasar perbaikan kinerja. Dalam Pedoman Zakat 9 Seri Kementerian Agama RI tahun 2009, juga telah mengatur bahwa pengendalian tersebut dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir. Dengan demikian, diharapkan setiap pengurus yakin dan mempunyai pengetahuan serta kesadaran tentang prinsip accountability, agar dapat melaksanakannya dengan baik.

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dapat mempertahankan kepercayaan para stakeholder (muzaki) dan masyarakat umum



(publik). Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator sebagai berikut (Yulianti, 2016):

1. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
2. Komite audit dan manajemen risiko
3. Koordinasi program kerja
4. Monitoring program kerja/kegiatan
5. Evaluasi program kerja/kegiatan

KNKG memberikan pedoman untuk mengukur tingkat akuntabilitas suatu perusahaan atau organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi-misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus menyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

### C. Responsibilitas

Dalam hubungan dengan asas responsibilitas (*responsibility*), perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan

usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*). (KNKG, 2006)

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku (Kaihatu, 2006 dalam Permana & Baehaqi, 2018). Sedangkan menurut Hastuti, 2005 dalam Permana & Baehaqi, 2018 Responsibility meliputi: (a) Menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan, (b) Para pihak yang berkepentingan harus perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. (c) Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, (d) Jika diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sudah seharusnya dikelola dengan baik berdasarkan pada prinsip responsibilitas agar tercapai kesinambungan. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) juga harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aktif dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Lembaga Pengelola Zakat memiliki tanggungjawab sosial terhadap para stakeholder (muzaki) dan masyarakat (publik), dalam menghindar dari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak, dan tetap menjaga lingkungan lembaga yang sehat. (Prabowo, 2018)

Menurut Sudarti dalam Yulianti (2016), menyatakan bahwa bentuk tanggungjawab sosial tersebut misalnya pengobatan gratis, gerakan kebersihan

lingkungan, donor darah, bantuan persalinan gratis, dan mobil ambulance. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator berikut (Yulianti, 2016):

1. Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan
2. Kewajiban sosial perusahaan (CSR)
3. Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
4. Keterbukaan informasi sesuai regulasi
5. Etika, moral, dan akhlak

KNKG memberikan pedoman untuk mengukur tingkat responsibilitas suatu perusahaan atau organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsipkehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antaran lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### D. Independensi

Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. (KNKG, 2006) Independensi dapat dikatakan juga sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Kaihatu, 2006 dalam Purnama & Baehaqi, 2018). Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus dikelola secara independen sehingga masing-masing unit atau divisi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Yulianti, 2016).

Independensi berarti LAZ harus mampu menghindari adanya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. LAZ tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus dapat menghindari segala macam bentuk konflik kepentingan. LAZ harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Mahmudi, 2009 dalam Permana & Baehaqi, 2018).

Mengukur tingkat independensi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memberikan pedoman pokok pelaksanaan yaitu:

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflictif interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

#### E. Kewajaran dan Kesenjajaran (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (KNKG,2006). Kaihatu,2006 dalam Permana & Baehaqi,2018 Menyebutkan *fairness* merupakan perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Lembaga Pengelola Zakat dapat merencanakan beberapa alternatif kegiatan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Seperti menyelenggarakan rapat koordinasi atau rapat kerja tahunan yang dihadiri oleh perwakilan muzakki, menyediakan fasilitas kotak saran, menyediakan layanan melalui sms bebas pulsa, email lembaga, media sosial lembaga, dan penyediaan website termasuk mengupdate-nya.Maka penerapan prinsip fairness tersebut sangat perlu dioptimalkan, dalam membangun pengetahuan dan kesadaran (*awareness*) seluruh elemen Lembaga Pengelola Zakat meningkat, khususnya para pengurus Amil Zakat (Yulianti, 2016).

Mengukur tingkat independensi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memberikan pedoman pokok pelaksanaan yaitu:

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

#### F. Kepribadian (*Integrity*)

Menurut Mulyadi (2007) menjelaskan bahwa Integritas adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan sesuatu hal yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh seseorang tersebut untuk menjadi sebuah kenyataan, kesempurnaan dan kelengkapan, prinsip tersebut perlu dikembangkan dengan maksud menjaga integritas pelaporan keuangan, melalui penyajian laporan keuangan yang lengkap dan menyeluruh.

Implementasi prinsip tersebut secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa pengurus Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan melaporkan aktivitas keuangan terkait dengan jumlah keseluruhan dana zakat yang telah berhasil dihimpun dan disalurkan. Hal tersebut harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tanpa terdapat sedikitpun data yang ditutupi. Dengan demikian, laporan keuangan yang disampaikan tidak hanya secara global, melainkan lengkap dan terperinci (Yulianti, 2016). Kondisi tersebut dikuatkan oleh Triyuwono dan As-Udi (2001) dalam Yulianti (2016), bahwa laporan keuangan harus menyediakan informasi yang lengkap kepada *stakeholders*, dan tidak boleh dibuat untuk memenuhi kepentingan seseorang atau sekelompok orang, atas kerugian orang atau kelompok lain (Triyuwono & As'udi, 2001).

#### G. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan merupakan kemampuan untuk dapat memberikan jasa yang dapat diandalkan dan akurat. Kinerja pelayanan yang handal adalah harapan dari konsumen, dan hal tersebut berarti sebuah pelayanan harus diberikan tepat waktu, sesuai dengan cara yang diharapkan konsumen, dan tanpa adanya kesalahan di setiap penyediaan pelayanan (Edastama, 2014).

Adapun teknis implementasi prinsip *reliability*, dibenarkan oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa harus menyajikan semua informasi tentang kegiatan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) secara akurat dan teliti. Hal tersebut penting untuk meminimalisir kesalahan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan para stakeholder (muzaki) dan masyarakat umum (publik) (Yulianti, 2016).

Lebih lanjut prinsip tersebut dapat juga diwujudkan dengan cara mengembangkan komunikasi yang handal terkait seluruh aktivitas kegiatan dan program dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), yang dapat menghubungkan dengan mudah antara Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dengan para *stakeholder* (muzaki). Karena menurut (Sudewo, 2004) dalam Yulianti (2016), komunikasi yang tidak lancar, dapat mengakibatkan tertahannya informasi, baik dengan cara sengaja ataupun karena kelalaian, yang mengakibatkan kerugian lembaga (Yulianti, 2016).

#### H. Kemampuan (*Competence*)

Menurut sejumlah besar pakar bidang sumber daya manusia pada konferensi mengenai kompetensi dalam Prihadi (2004) menyepakati bahwa: kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling terkait mempengaruhi sebagian besar jabatan (peranan atau tanggung jawab), berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut, dan dapat diukur dengan standar-standar yang dapat diterima, serta dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan (Prihadi, 2004).

Adapun teknis implementasi prinsip competence tersebut, secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa para pemangku kepentingan di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus memiliki kompetensi yang memadai, terkait fungsi-fungsinya dalam menjalankan tugas sebagai pemangku kepentingan. Misalnya dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Amil Governance* di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), Dewan Pertimbangan harus benar-benar berkompeten dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi saran, Komisi Pengawas harus benar-benar menjalankan fungsinya dalam memberikan pengawasan, Badan Pelaksana harus benar-benar berfungsi sebagai pelaksana yang bertanggung jawab (Yulianti, 2016).

Dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Amil Governance* tersebut, Menteri Agama, Bupati, atau Walikota harus benar-benar berfungsi sebagai penegak terlaksananya pengelolaan zakat berbasis *Good Amil Governance*, sehingga perlu optimalisasi tugas yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang



berlaku. Urgensi penerapan prinsip kompetensi sangat terkait dengan pengelolaan lembaga zakat yang profesional. Kondisi tersebut ditegaskan oleh Muhammad dan Abubakar HM (2011) dalam Yulianti (2016), bahwa pengelolaan zakat secara profesional membutuhkan sumber daya yang profesional dan terampil, serta memiliki kompetensi di masing-masing bidang (Yulianti, 2016).

#### I. Nama Baik (*Reputation*)

Reputasi merupakan upaya meningkatkan citra atau nama baik suatu organisasi atau perusahaan secara internal dan eksternal. Memiliki arti untuk diperlakukan penting dan bernilai, serta menjadi sebuah kehormatan. Dampak positif yang dihasilkan dari reputasi adalah sebuah kepercayaan kepada public, baik secara internal dan eksternal. Para karyawan sebagai publik internal akan merasa bangga dalam bekerja untuk organisasi yang terbukti memiliki reputasi dan akan bekerja lebih giat, rajin dan semangat (Indahingwati, 2019).

Adapun teknis implementasi prinsip reputasi tersebut, secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa lembaga zakat harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat berupa pelayanan terhadap muzaki dan masyarakat, seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang kesadaran berzakat melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan sistem pengelolaan zakat di lembaga. Pendapat para praktisi LPZ tersebut menguatkan tesis Lusiaty (2008), bahwa kualitas pelayanan lembaga zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas muzaki (Yulianti, 2016).

Seluruh aspek tersebut diatas berperan sebagai dasar pijakan atau pedoman bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam memilih dan menetapkan aktivitas, kegiatan dan program yang harus dilakukan. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, semua kegiatan dapat bersinergi, guna mencapai tujuan fungsi utama dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) sebagai lembaga keuangan publik Islam. Dimana memiliki kewajiban sebagai lembaga yang berperan aktif dalam aktivitas kegiatan kederawanan (*charity*) yang mewadahi kepentingan para stakeholder (muzaki) dalam menunaikan ibadah Zakat, Infak/Shadaqah sebagai upaya dalam memberdayakan ekonomi para mustahik/penerima bantuan (Yulianti, 2016).

## **2.2. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Chotib dkk (2018) menyatakan bahwa penerapan lima prinsip *good governance* di Lembaga Amil Zakat di kabupaten jember telah dilakukan, tetapi masih belum optimalnya penerapan *good amil governance* di Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember beberapa factor antara lain: 1). Pemerintahan Amil Zakat Institute belum sepenuhnya professional dalam pengelolaannya, 2). Kurangnya kualitas dan kualitas sumber daya manusia di setiap Lembaga Amil Zakat, 3). Kurangnya dukungan public, terutama komunitas muslim yang ada di pedesaan (kearifan lokal), karena biasanya komunitas Muslim di pedesaan cenderung menyalurkan zakatn di masjid dan pemimpin agama pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Alyani (2018) menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa telah melaksanakan *Good Corporate Governanced* dengan baik terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemadirian, dan kewajaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2017) menyatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta yang meliputi Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat telah mengimplementasikan kelima prinsip GCG yang terdiri dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, dan Fairness*. Tetapi penerapannya secara umum masih terdapat beberapa kekurangan karena ada beberapa OPZ yang belum menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Jika dilihat dari jumlah skor pada hasil analisis data pada tiap-tiap organisasi, dapat disimpulkan bahwa Rumah Zakat merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terbaik yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dan BAZNAS Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang pengimplementasian GCG nya masih kurang baik dibandingkan dengan OPZ lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Endryana (2016) menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta sudah melaksanakan prinsip tersebut secara keseluruhan. Dilihat dari upaya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta yang selalu memberikan yang maksimal disetiap prinsip yang terdapat dalam *good corporate governance*, walaupun di dalam transparansi yang terdapat dalam peraturannya yang menyebutkan untuk hal pelaporannya juga melibatkan pemerintah daerah selaku penerima laporan. Akan tetapi dalam hal ini dikarenakan pemerintah yang belum memberikan kejelasan kepada lembaga-

lembaga yang mengurus dana zakat, infaq, dan sedekah, kemana mereka harus melaporkan segala kegiatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2014) menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Jepara belum maksimal dalam menerapkan *good corporate governance* dari aspek akuntabilitasnya serta perlu peningkatan dalam pelaksanaannya yaitu dari segi independensi, komitmen organisasi, kompetensi, dan transparansi lembaga.

Penelitian yang dilakukan oleh Adha (2012) menyatakan bahwa bahwa Pos Kedilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya telah menjadi lembaga amil zakat yang sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam mengemban amanah dan tanggung jawabnya. Meskipun ada beberapa yang harus disempurnakan lagi, akan tetapi dengan komitmen yang tinggi dari manajemen PKPU Surabaya untuk menjadikan lembaga amil zakat ini menjadi lembaga yang professional.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahjuni dkk (2019) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerapan *good corporate governance* pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional. Adanya perbedaan penerapan *good corporate governance* tersebut disebabkan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keadilan, dan independen telah diterapkan dengan baik oleh Badan Amil Zakat Nasional dibandingkan pada Lembaga Amil Zakat Nasio

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai selesai. Tempat yang dijadikan obyek penelitian adalah Dompot Sejuta Harapan (DSH) cabang klaten yang beralamatkan Jalan Mayor Kusmanto Gg. Ketapang Rt.003 RW.004 Ngingas Baru, Ngingas Baru, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57438.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Penelitian yang peneliti lakukan ini bertujuan untuk menganalisis suatu Lembaga Amil Zakat yang ada di Klaten yaitu Dompot Sejuta Harapan (DSH) apakah lembaga tersebut telah menerapkan *Good Amil Governance*. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten telah menerapkan sembilan prinsip *Good Amil Governance* yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, Fairness, Integrity, Reliability, Competence* dan *Reputation* atau belum.

Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan mengambil obyek penelitian yaitu Lembaga Amil Zakat Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten. Penelitian ini menggunakan sembilan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, Fairness, Integrity, Reliability, Competence* dan *Reputation* sebagai standar yang digunakan dalam menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* di Dompot Sejuta Harapan (DSH).

### **3.3. Subyek Penelitian**

Subyek atau informan dalam penelitian ini terdiri dari Direktur, *Human Resource Departement* (HRD) dan Bagian Keuangan dari Dompot Sejuta Harapan (DSH) di Klaten untuk mengetahui penerapan *Good Amil Governance*.

### **3.4. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara semi terstruktur yang dilakukan langsung dengan narasumber di lembaga Dompot Sejuta Harapan (DSH) di Klaten yaitu Direktur, *Human Resource Departemen* (HRD), Bagian Keuangan.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Metode Wawancara Semi Terstruktur**

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang ada di lembaga Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan standar *Good Amil Governance*, akan tetapi terdapat pertanyaan tambahan di dalam

praktik wawancara langsung untuk perkembangan atau perluasan pertanyaan.

## 2. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara terjun langsung ke lokasi obyek penelitian, yakni dengan melihat bagaimana proses pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten. Kemudian, peneliti menemui para informan terkait untuk mencari informasi mengenai prinsip-prinsip penerapan *Good Amil Governance* pada pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten.

## 3. Dokumentasi

Penelitian ini juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian untuk menambah data-data yang diperlukan peneliti. Dokumen pendukung dapat di akses peneliti melalui website resmi Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten, berupa struktur organisasi, profil lembaga dan visi misi lembaga.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Peneliti melakukan analisis penerapan *good amil governance* dengan membandingkan teori dan indikator yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah

penelitian. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator yang dikemukakan oleh hasil disertasi dari Yulianti (2016) dan menarik kesimpulan dari hasil perbandingan apakah prinsip-prinsip *good Amil governance* sudah diterapkan sesuai dengan indikator yang ada.

Tabel 3.1

Indikator *Good Amil Governance*

Variabel	Instruments	Indicator
<b>Prinsip Good Amil Governance (GAG)</b>	<b>Transparancy (Keterbukaan)</b>	Rencana kerja tahunan
		Laporan keuangan berkala bulanan
		Laporan keuangan berkala tengah tahunan
		Laporan keuangan berkala tahunan
		Sistem akuntansi berbasis teknologi informasi dalam pelaporan kegiatan dan keuangan
		Laporan keuangan dipublikasikan secara periodik baik di media online maupun media cetak lainnya
	<b>Accountability (Dapat dipertanggungjawabkan)</b>	Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
		Koordinasi program kerja
		Monitoring program kerja atau kegiatan
		Evaluasi program kerja
	<b>Responsibility</b>	Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan
		Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
		Keterbukaan informasi sesuai regulasi
		Menerapkan etika, moral, dan akhlak dalam pelayanan
	<b>Independency (Kemandirian)</b>	Kondisi saling menghormati hak, kewajiban dan tugas masing-masing bidang/devisi
		Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga



		Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan
		Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ/devisi dalam lembaga
		Telah mendapat legalitas hukum
	<b><i>Fairness</i> (Keadilan dan kesetaraan)</b>	Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus/oragan lembaga
		Keadaan melakukan muzaki dan mustahik secara adil dan jujur
		Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus
		Kondisi membolehkan muzaki memberikan masukan sesuai ketentuan
		Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak yang berkebutuhan
	<b><i>Integrity</i> (Kepribadian)</b>	Keterkaitan antar pengurus dan aktivitas dilakukan
		Meningkatkan kualitas laporan keuangan tentang dana terhimpun, di distribusikan dan di dayagunakan secara lengkap dan terperinci
	<b><i>Reliability</i> (Keandalan)</b>	Menyediakan informasi secara akurat dan terpercaya
		Publikasi informasi perubahan kebijakan lembaga skala umum
		Mengembangkan komunikasi handal antara lembaga dan muzaki
	<b><i>Competance</i> (Kemampuan)</b>	Amil memiliki kecakapan atau kemampuan yang memadai
		Sumber daya manusia yang profesional dan terampil serta memiliki kompetensi di bidangnya
	<b><i>Reputation</i> (Nama Baik)</b>	Menjaga nama baik dengan cara menjalin hubungan baik dengan masyarakat
		Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang kesadaran berzkat

		Memperoleh prestasi dari berbagai pihak
--	--	---

*Sumber: (Yulianti, 2016) dengan penyesuaian*

### **3.7. Validitas dan Reliabilitas Data**

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid (benar/sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya) dan reliable (dapat diandalkan), maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan memeriksa kembali suatu informasi yang didapat dari tiga narasumber atau informan, yaitu Direktur, *Human Resource Departement* (HRD) dan Bagian Keuangan. Sedangkan untuk triangulasi teknik yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Profil Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten**

#### **1. Sejarah Berdirinya Dompot Sejuta Harapan (DSH)**

Dompot Sejuta Harapan yang disingkat dengan DSH adalah lembaga Non Pemerintah, bersifat Independen dan Non Partisan. DSH merupakan kelanjutan dari Lembaga Otonom Underbow Yayasan Hidayah yang berdiri sejak tahun 1997, dengan akte pendirian Notaris Sri Mulyani Rahayuningsih, SH No 31 Tanggal 26 April 2012. Tercatat dikesbag Linmas No 220/556, tanggal 1 Desember 1997 dengan nomor NPWP 02.057.821.7-525.000.

Tahun 2012 tercatat di Menkumham No. AHU-3705. AH.01.05. dengan harapan untuk memperluas peran lembaga ini maka digagaslah suatu nama baru Dompot Sosial Hidayah yang kemudian di kenal dengan singkatan DSH dan lebih dipertegas lagi identitasnya dengan kepanjangan Dompot Sejuta Harapan.

#### **2. Visi dan Misi Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten**

Visi

*“Menjadi lembaga sosial dan kemanusiaan yang unggul dan mengakar di masyarakat.”*

Misi

- a. Mengembangkan mode kegiatan sosial dan kemanusiaan yang solutif dan teat sasaran.

- b. Menciptakan isu kepedulian sosial pada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
- c. Menciptakan SDM yang solid, berkualitas dan profesional serta relawan yang siaga dan berkarakter.
- d. Menciptakan Lembaga yang memiliki branded, karakter dan memiliki diferensiasi yang kuat di segala lini.
- e. Menciptakan wajah lembaga yang bersahabat dan berkarakter dengan didukung oleh kepercayaan public yang baik.
- f. Memiliki jaringan kelembagaan yang kuat didukung oleh sinergi dan kemitraan.

### **3. Struktur Organisasi Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten**

#### **a. Dewan Pembina Syariah**

- Bambang Zunaidi, SE
- Drs. Sri Widodo
- Ikhwan Hanif, ST
- Nanang Masykuri, ST

#### **b. Pengurus DSH**

- Ketua 1 : Tata Sutarya, S.Pt
- Sekretaris : Widiyanto, ST
- Bendahara : Sugiyono
- Pengawas : Joko Priyono, S.Sos

#### **c. Pengurus Harian DSH**

- Direktur : Janu Kurniawan, SE

- Bagian Keuangan : Ulfah Uswatun Hasanah
- Manager Program : Didik Purnomo S.I.P  
Staff : Rohmadi dan Tri Yunanto
- Bagian Media : Bintoro Galih Wicaksosno
- Manager Partnership : Muh. Rozy M  
Staff : Agus Hardiyanto dan Sutris
- Bagian Online : Kasihana

#### **4. Program-Program Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten**

- a. Perpustakaan Bergerak
- b. Dropping Air Bersih
- c. Qur'an Homestay
- d. Beduq Sedekah Subuh
- e. Ambulan Sejuta Harapan
- f. Keranda Siaga Bencana
- g. Beras Baksos
- h. Majalah Orange
- i. Gubug Keranda
- j. Bank Sampah

#### **4.2 Penerapan Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)**

**Berdasarkan Prinsip *Good Amil Governance* (GAG) di Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten**

Rahmani Timorita Yulianti dari hasil desertasi yang termuat dalam sebuah buku berjudul “ *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*”

pada tahun 2016 menjelaskan bahwa pada dasarnya prinsip yang terkandung dalam *Good Amil Governance* merupakan perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance*. Instrumen yang digunakan dalam menganalisis prinsip *Good Amil Governance* (GAG), yaitu *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (keadilan dan kesetaraan), *Integrity* (kepribadian), *Reliability* (keandalan), *Competence* (kemampuan) dan *Reputation* (nama baik), disebut Lembaga Pengelola Zakat.

Berikut pemaparan hasil penelitian terhadap penerapan *Good Amil Governance* (GAG) di Dompet Sejuta Harapan (DSH) Klaten:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan dalam melakukan tata kelola di sebuah lembaga publik untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, selain itu juga menjadi bagian utama dalam membangun kinerja sebuah lembaga yang baik dan sehat. Transparansi yang diberikan oleh Dompet Sejuta Harapan (DSH) dengan melaksanakan rencana kerja tahunan yang membahas tentang rencana program kerja selama satu tahun kedepan selain itu juga membahas tentang evaluasi program kerja yang sudah terlaksana selama satu tahun, masing-masing divisi di lembaga zakat Dompet sejuta Harapan (DSH) menyampaikan hasil kinerja dari divisi tersebut. Selain itu Dompet Sejuta Harapan (DSH) memanfaatkan media secara online dan offline.

Terdapat beberapa media yang digunakan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH) sebagai bentuk layanan dalam transparansi terkait pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Tabel 4.1

## Media Informasi dan Komunikasi Digital DSH

No	Media	Portal Site
1.	Website Resmi	<a href="http://www.dsh.co.id">www.dsh.co.id</a>
2.	Instagram	@dompot sejuta harapan
3.	Facebook	dompot sejuta harapan
4.	Twitter	@dshonline
5.	Telp	(0272)3392259

*Sumber: Data diolah Penulis 2020*

Segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta laporan aktivitas pelaksanaan program terhimpun dalam media online, laporan keuangan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) bisa dilihat melalui media cetak dengan menggunakan majalah *orange* sehingga secara jelas dan akurat dapat diperoleh oleh masyarakat dengan mengakses layanan media tersebut.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh mbak Latifah selaku Bagian Keuangan DSH, pada tanggal 11 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“...laporan keuangannya hanya di publikasikan lewat majalah”. (Wawancara penulis, 2020.*

Setiap bulan DSH memberikan transparansi laporan keuangannya melalui media cetak dengan menggunakan majalah orange, sehingga setiap para donatur yang menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui DSH diberikan majalah tersebut sebagai tanda keterbukaan lembaga kepada masyarakat. Transparansi yang dilakukan oleh DSH juga dibuktikan dengan setiap enam bulan sekali dari pihak lembaga mendapatkan pengawasan dari Kemenag Klaten dengan meminta laporan keuangan untuk melihat pendistribusian yang dilakukan lembaga dan laporan keuangan yang dibuat setiap enam bulan sekali itu tembus ke BAZNAS Daerah.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pak Janu Kurniawan selaku Direktur DSH, pada tanggal 11 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“Baik, untuk transparansi setiap bulan itu kita ada laporan keuangan yang di publis lewat majalah orange itu yang pertama, untuk yang kedua untuk menjalankan transparansi setiap enam bulan sekali itu kita ada pengawasan dari Kemenag Klaten itu dia nanti minta laporan keuangan di kita untuk dilihat tasyarufnya kemana aja termasuk misalnya perolehannya itu nama donaturnya siapa, nama muzakinya siapa dan alamatnya dimana itu bagian dari proses transparansi dan kemudian data keuangan kita bisa dilihat oleh stakeholder. Jadi kalau untuk Kemenag setiap enam bulan sekali buat laporannya kemudian tembusan ke BAZNAS Daerah itu kemudian kalau untuk ke public kita ada laporan keuangan yang kita sajikan walaupun tidak semua, karena tidak semua orang faham tentang neraca atau perubahan keuangan tapi kalau format keuangan yang lengkap ada neraca, perubahan dana dan seterusnya ke Kemenag kabupaten, pusat, BAZNAS dan stakeholder yang membutuhkan dan kita juga baru persiapan untuk audit eksternal dan kemaren kita juga melakukan audit internal.”(Wawancara penulis, 2020)*



Berikut beberapa uraian dari aspek *transparency* (Keterbukaan) yang dilakukan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH), yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi secara terbuka, baik informasi laporan keuangan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), laporan kegiatan, program kerja melalui media online maupun cetak.
  - b. Melaksanakan rencana kerja tahunan.
  - c. Melaporan hasil laporan keuangan setiap sebulan sekali
  - d. Melaporkan hasil laporan keuangan setiap enam bulan sekali
  - e. Adanya laporan keuangan tahunan.
2. *Accountability* (Dapat dipertanggungjawabkan)

Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pencapaian kegiatan dalam pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemantauan sampai dengan evaluasi adalah hal yang dimiliki setiap lembaga. Akuntabilitas dalam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), merupakan kunci untuk memastikan bahwa Amil Zakat dalam melaksanakan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah sudah sesuai dengan prosedur, peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan para stakeholder (muzakki) maupun masyarakat umum (publik). Berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, dalam Islam merupakan sebuah hal yang erat kaitannya dengan cara-cara pengakuan, pencatatan, serta etika dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh para pemegang amanah. Sehingga sebuah sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Maka sistem

akuntabilitas juga memegang peran penting dalam persoalan zakat bagi seluruh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) (Permana & Baehaqi, 2018).

Dompot Sejuta Harapan (DSH) merupakan salah satu lembaga sosial yang mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), program kerja, tata kelola dan pelaporan, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan oleh DSH harus sesuai dengan aturan syari'at. Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan di rumuskan dalam bentuk visi-misi DSH kedalam program kerja, tujuan merupakan suatu langkah yang tepat sistematis atas perspektif pembangaunan kinerja amal zakat dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Salah satu hal yang terpenting dalam akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, wewenang dan pertanggungjawaban setiap bidang dalam proses pengelolaan dana ZIS pada lembaga pengelola zakat.

Mekanisme prosedur manajemen dan program kelembagaan yang dilakukan oleh DSH telah memiliki aturan yang jelas dan terarah yang sudah terangkum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam melakukan tugas para amal zakat sesuai dengan devisi masing-masing sebagai upaya dalam mendapatkan hasil kegiatan dan program kerja secara maksimal.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pak Zakky Mubarak selaku HRD DSH, pada tanggal 12 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“Kami ada SOP untuk setiap devisi khususnya nanti di program sama pengambilan donasi.” (Wawancara penulis, 2020).*

Evaluasi setiap program kerja atau kegiatan menjadi salah satu hal penting yang harus diterapkan dalam sebuah lembaga, organisasi karena untuk meningkatkan kualitas program kerja seperti yang diterapkan oleh DSH setiap selesai melaksanakan kegiatan diadakan evaluasi tergantung dengan program kerja yang terlaksanan dalam skala besar atau kecil.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pak Zakky Mubarak selaku HRD DSH, pada tanggal 12 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“Iya, jadi setiap selesai kegiatan diakan evaluasi dan itu juga tergantung pada lingkup program kerjanya misalkan kalau untuk ramadhan kan besar jadi untuk evalusinya juga ada dan melibatkan beberapa orang dan hasil evalusinya juga di lampirkan di laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan kalau untuk ambulan itu evalusinya hanya dilingkup devisinya.” (Wawancara penulis, 2020).*

Koordinasi serta monitoring program kerja merupakan salah satu hal terpenting selain adanya evaluasi program kerja, seperti halnya yang dilakukan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH) juga melakukan koordinasi program kerja setiap akan melakukan kegiatan salah satunya yaitu menyampaikan hasil dari rapat dengan pengurus pusat kepada pengurus DSH atau dengan masing-masing divisi.

Berikut beberapa uraian dari aspek *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan) yang dilakukan oleh DSH yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki kejelasan fungsi manajemen struktur kepengurusan sebagai Amil Zakat.
- b. Memiliki Standar Operasional Presedur (SOP) dalam setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan.

- c. Melakukan Koordinasi dan monitoring program kerja.
- d. Melaporkan hasil laporan keuangan secara tepat waktu
- e. Mengadakan evaluasi setiap selesai kegiatan berlangsung

### 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten dalam melaksanakan instrumen pertanggungjawaban terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan laporan keuangan kepada para donatur dan juga dengan mengadakan gathering bersama dengan donatur dan muzaki yang dilakukan setiap satu tahun sekali, di dalam gathering tersebut pihak lembaga DSH menyampaikan terkait progress perkembangan DSH, dan juga mengundang beberapa perwakilan dari pusat.

Etika, Moral dan Akhlak dalam pelayanan kepada para donatur juga diterapkan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH) dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku di Dompot Sejuta Harapan (DSH). Selain itu bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh DSH adalah dengan menerapkan undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pak Janu Kurniawan selaku Direktur DSH, pada tanggal 11 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“Kita mengadakan gathering untuk muzaki sama donatur yang dilakukan setiap setahun sekali, disana kita menyampaikan terkait progress perkembangannya kita, tentunya kita juga mengundang dari perwakilan-perwakilan misal dari pusat.”(Wawancara penulis, 2020).*

Dompot Sejuta Harapan (DSH) dalam pengelolaan lembaga juga menggunakan aturan terkait dengan undang-undang yaitu dengan menggunakan undang-undang No 13 Tahun 2003 berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pak Zakky Mubarak selaku HRD DSH, pada tanggal 12 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“Kita pakai Undang-Undang No 13 Tahun 2003, undang-undang ketenagakerjaan, seluruh karyawan kita beri, terkait cuti, dan lain sebagainya...” (Wawancara penulis, 2020).*

Salah satu cara untuk meningkatkan jaringan di kalangan masyarakat hal yang dilakukan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH) adalah bermitra dengan masyarakat dan bina lingkungan. Berikut beberapa uraian dari aspek *responsibility* (pertanggungjawaban) yang dilakukan oleh DSH yaitu sebagai berikut:

- a. Menerapkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Keterbukaan informasi.
- c. Menerapkan etika, moral dan akhlak dalam pelayanan.
- d. Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan.

#### 4. *Independency* (Kemandirian)

Dompot Sejuta Harapan (DSH) merupakan lembaga non pemerintah yang bersifat independen dan non partisipan. Berdasarkan prinsip independent (Kemandirian) di Dompot Sejuta Harapan (DSH) adalah saling menghormati hak, kewajiban dan tugas dari masing-masing divisi selain itu

Dompot Sejuta Harapan (DSH) juga menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Mendapatkan legalitas secara hukum merupakan poin penting, di Dompot sejuta Harapan (DSH) untuk legalitas lembaga masih menunggu hasil dari Kemenag namun selain itu lembaga tersebut juga sudah tergabung di Forum Organisasi Zakat (FOZ).

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pak Janu Kurniawan selaku Direktur DSH, pada tanggal 11 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“Kita sudah tergabung di FOZ (Forum Organisasi Zakat) kemudian kita juga ketika mengajukan izin ke BAZNAS itu ada syarat-syarat misalnya karyawan itu tercatat ada SK-nya kemudian juga mengikuti perundang-undangan ketenagakerjaan, harus punya BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan itu juga punya, kemudian ada juga surat keterangan bahwa kita tidak double job dengan lembaga zakat lainnya ya semacam kayak fakta integritas” (Wawancara penulis, 2020).*

Adanya manajerial dalam pengelolaan lembaga zakat baik dapat menunjang kinerja dalam membant pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi-sosial kehidupan masyarakat yang ada di Klaten. Serta salah satu prinsip organisasi yang diterapkan oleh DSH adalah:

- a. Independen : Bebas Bersikap, Mandiri dan Non Partisipan
- b. Netral : Tidak Memihak dan Bersikap Adil
- c. Religiuas : Berorientasi Spiritual
- d. Transparan : Komunikasi kepada pihak yang berkepentingan

Berikut beberapa uraian dari aspek *independency* (Kemandirian) yang telah dilakukan oleh DSH, yaitu:

- a. Tidak memihak siapapun dalam pengambilan keputusan.
- b. Saling menghormati hak, kewajiban dan tugas dari masing-masing divisi.

5. *Fairness* (Keadilan dan Kesetaraan)

Melakukan pelayanan yang baik terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan proporsi yang seharusnya merupakan penekanan kepada amil zakat yang harus diterapkan karena merupakan instrument keadilan dan kesetaraan di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Melaksanakan kinerja dengan baik dan benar sesuai dengan tugas dan fungsinya, apabila terdapat kesalahan maka diberikan teguran ataupun hukuman dengan kadar yang sama tanpa ada pengecualian baik ketua bidang, staff yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH).

Keadilan dan kesetaraan juga diberikan oleh DSH kepada seluruh elemen, baik muzaki maupun mustahik dalam penggunaan sistem manajemen operasional dengan proses manajemen pembayaran yang sederhana dan mudah yaitu dengan menggunakan ATM melalui rekening DSH yang sudah disediakan 5 Bank, baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional selain itu juga melalui layanan Go-pay dan Ovo serta menerima donasi langsung dengan datang ke kantor pusat Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pak Janu Kurniawan selaku Direktur DSH, pada tanggal 11 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“Kita ada group untuk para donatur, setiap tim partnership membuat group dengan para donaturnya nah di situ para donatur bisa memberikan masukan dan juga kritikan kepada DSH, kadang-kadang kita juga dapat usulan-usulan dari para donatur terkait program kerja, dimulai akhir tahun 2019 ada program jum’at berkah itu berawal dari masukan beberapa donatur yang punya warung soto atau apa jadi itu sebagai penyaluran sedekah produknya.” (Wawancara peneliti, 2020).*

Dompot Sejuta Harapan(DSH) juga membuka kesempatan kepada masyarakat publik untuk berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran yang dapat dilakukan melalui media online dengan layanan via email [hrd@dsh.co.id](mailto:hrd@dsh.co.id) dan Telp: (0272) 3392259 atau Hp: 085- 0000-1011.

Berikut beberapa uraian dari aspek *fairness* (Keadilan dan Kesetiaan) yang dilakukan oleh DSH Klaten yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perlakuan yang sama terkait sanksi yang diberikan bagi setiap amil zakat yang melakukan kesalahan secara sengaja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memberikan masukan saran dan kritik terhadap kinerja amil zakat DSH
- c. Memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan donasi atau pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dengan menggunakan berbagai layanan online dan offline



## 6. *Integrity* (Kepribadian)

Menumbuhkan kepercayaan secara luas kepada masyarakat dan juga kepada para stakeholder untuk selalu menyalurkan zakat dan mengamanahkannya kepada lembaga pengelola zakat merupakan kepemilikan integritas dalam pribadi amil zakat. Dompot Sejuta Harapan (DSH) juga memiliki pakta integritas sebagai wujud pernyataan secara tertulis bagi seluruh pengurus internal amil zakat dalam berkomitmen untuk menegakkan aturan syari'at dan aturan hukum yang berlaku dengan tegas.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pak Janu Kurniawan selaku Direktur DSH, pada tanggal 11 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“Kita ada fakta integritas ya, kita juga ada evaluasi pengawasan dari kemenag dari BAZNAS jadi kalau misalnya dari cerita yang ada ya kita sudah sinergi dengan PDM, PCNU, kita sudah sinergi BAZNAS dengan Kemenag, komunitas-komunitas yang ada...” (Wawancara penulis, 2020).*

Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat juga dengan cara meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh mbak Latifah selaku Bagian Keuangan DSH, pada tanggal 11 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“Iya kita juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu rencananya akan dengan Pembaruan sistem kita mau ke balace, nah itu seperti PT, jadinya dia juga faham terkait akuntansi jadi akan lebih mudah...” (Wawancara penulis, 2020).*

Berikut beberapa uraian dari aspek *integrity* (Kepribadian) yang dilakukan oleh DSH, yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki pakta integritas
- b. Meningkatkan kualitas laporan keuangan

#### 7. *Reliability* (Keandalan)

Menyediakan pelayanan yang terpercaya dan akurat merupakan kemampuan dalam aspek keandalan. Dalam aspek ini juga bisa diwujudkan dengan cara mengembangkan komunikasi yang handal terkait seluruh aktivitas kegiatan dan program dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), yang dapat menghubungkan dengan mudah antara Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dengan para *stakeholder* (muzaki) (Yulianti, 2016).

Dompot Sejuta Harapan (DSH) menerapkan aspek keandalan dengan menyediakan informasi secara akurat dan terpercaya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya selain itu Dompot sejuta Harapan (DSH) juga melakukan komunikasi baik dengan para muzaki, karena DSH menerapkan aspek keterbukaan setiap masyarakat bisa mengakses melalui media online maupun media cetak sehingga beberapa program kerja bisa di andalkan. Setiap ada kebijakan baru yang dilakukan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH) maka untuk para donatur dan masyarakat umum mengetahui kebijakan tersebut melalui media yang di gunakan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH).

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pak Janu Kurniawan selaku Direktur DSH, pada tanggal 11 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“Itu, saya kira karena tadi kita terbuka dan bisa mengakses lewat media online dan juga offline itu juga yang paling diandalkan program yang paling andal ya adalah ambulan dan juga itu langsung ke droping air bersih, jadi itu langsung ke drivernya. Kemudian kita juga ada pondok yatim penghafal Qur'an, kita sekarang juga muharam ceria masyarakat bisa mengakses penuh, selalu ada sinergi setiap tahunnya. Ketika kita melakukan sebuah program kerja selalu ada instansi yang bersinergi dengan kita, kejaksaan, intan sejati RSI dan lain sebagainya. Ya itu sudah termasuk program kerja yang andal ya, dapat diandalkan. Para masyarakat juga sudah hafal dengan program kerja yang dilaksanakan dengan DSH.” (Wawancara peneliti, 2020).*

Berikut beberapa aspek *reliability* (keandalan) yang dilakukan oleh DSH, yaitu:

- a. Melaksanakan komunikasi yang baik dengan para muzaki.
- b. Menyediakan Informasi secara akurat dan terpercaya.
- c. Publikasi informasi perubahan kebijakan lembaga skala umum.

#### 8. *Competence* (Kemampuan)

Dompot Sejuta Harapan (DSH) menerapkan aspek kemampuan salah satunya dengan langkah dalam menentukan pengurus amil zakat dengan melalui beberapa proses yaitu berupa administrasi dan tahap wawancara. Penilaian yang digunakan dalam proses administrasi adalah kelemkapan persyaratan yang sesuai dan memenuhi kriteria sebagai seorang amil, memiliki pengetahuan terkait pengelolaan dana zakat dan keagamaan, serta salah satu hal yang paling penting ketika ingin menjadi seorang amil zakat adalah kemauan.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pak Zaky Mubarak selaku HRD DSH, pada tanggal 12 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“...yang paling terpenting adalah mereka ada kemauan untuk menjadi seorang amil zakat.” (Wawancara peneliti, 2020)*

Serta dalam peningkatan kompetensi untuk pengurus amil zakat, DSH memeberikan pelatihan terlebih dahulu. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pak Janu Kurniawan selaku Direktur DSH, pada tanggal 11 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“Kita selalu ada upgrade kemampuan SDM, mulai yang dari setiap devisi juga ada yang tentang mansate dari para amilnya, jadi ketika ada open recruitment pengurus amil itu saat mereka sudah deal dengan kita maka, kita akan kasih arahan dan juga maset terkait visi misi dan lain-lain, meyakinkan bahwa bekerja di lembaga zakat bukan berarti tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Faktanya kita temukan bahwa yang bekerja di amil zakat pun bisa menjadi orang sukses, mimpi-mimpi mereka pun juga tercapai. Semua SDM disini untuk BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan itu kita punya dan bahkan dari pihak kita juga ada pelatihan untuk para amil baru. Nah untuk masa pandemi kali ini kita setiap pecan hai rabu malam ada meeting zoom dengan kegiatan sosiltalk se-Indonesia nanti dari sana kita transfer ilmunya ke pengurus yang lainnya karena kadang-kadang berkaitan dengan ilmu partnership, keuangan dan lain sebagainya dan seringkali setiap satu bulan sekali kita ada zoom bareng. Lalu setiap dua pekan sekali kita ada kajian untuk mengasah ruqiyah dan juga pemahan terhadap syariahnya, untuk fiqh zakat kita agendakan secara berkala setahun 2 kali updatetannya, dan saya selalu memberikan kesempatan untuk terus belajar.” (Wawancara peneliti, 2020)*

Berikut beberapa uraian dari aspek *competence* (Kemampuan) yang dilakukan oleh DSH, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan *recruitment* pengurus amil zakat secara procedural dan disesuaikan dengan bidang ilmu yang dibutuhkan.
- b. Mengikuti pelatiahn amil zakat.

### 9. *Reputation* (Nama Baik)

Pandangan yang baik yang diberikan oleh masyarakat umum kepada sebuah lembaga terkait kinerja amal, program kerja merupakan citra yang ada dalam sebuah lembaga. Reputasi yang diberikan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH) kepada masyarakat umum, muzakki serta mustahik yaitu dengan diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang baik serta memberikan kualitas program kerja yang bermutu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Serta memberikan inovasi terbaru terkait program kerja yang sesuai untuk meningkatkan tata kelola yang lembaga yang maksimal.

Selain itu salah satu cara DSH untuk mengangkat nama baik lembaga yaitu dengan program ambulan *fist call*. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pak Janu Kurniawan selaku Direktur DSH, pada tanggal 11 November 2020, yaitu sebagai berikut:

*“Kita dimulai dari Ambulan yang cukup mengangkat nama baik lembaga dan termasuk program DSH pertamakali, karena visinya DSH itu menjadi lembaga yang unggul dan mengakar di masyarakat, nah kita ingin program-program yang kita adakan bisa diterima dan diandalkan tadi oleh masyarakat, nah misalnya ambulan sejak awal kita setting inggin menjadikan ambulan kita itu fist call, kita pengen punya kesan setiap orang klaten yang pertama kali di telfon adalah DSH, nah sejak awal kemunculan ambulan ini awalnya tidak respek bahkan pada saat itu si driver mencari layanan satu saja susah, satu bulan iyu seperti menganggur, sampai kita buat penawaran menunggu di rumah Sakit bahwa kita membuka layanan gratis bahkan sampai tidak boleh menerima apapun, sampai dapat beberapa masukan bahwa kita dari pihak masyarakat juga menginginkan untuk memberi makanan dan lain-lain kepada drivernya masak tidak diperbolehkan, lalu sekarang jika ada pihak masyarakat yang memebri sesuatu kepada driver itu adalah jika memeng sedekah. Sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat sampai sekarang ini, hanya sekitar 3 tahunan lah ya sekarang kita*

*sudah menjadi fist call bahkan sampai overload, pada tahun 2016 kita buat proposal kita nanmba ambulan dengan pos 1 Solo, 1 Yogya dan 2 Klaten. Jadi ketika kita fist call itu ketika orang contak ke kita kemudian kita sedang ada layanan kemudian kita melakukan proses untuk agar kita bisa melayani kita carikan ambulan yang lainnya, jadi kita semacam garansi, kita membuat jaringan, kemudian driver kita dijadikan koordinator ambulan se-Klaten, kecuali yang RS ya. Nah itu yang cukup bisa menaikkan reputasi DSH.”(Wawancara peneliti, 2020)*

Adanya program ambulan dengan sistem *fist call* tersebut cukup meningkatkan nama baik lembaga DSH di kalangan masyarakat, selain itu salah satu cara DSH menjalin hubungan dengan 40 rumah masyarakat sekitar.

Berikut beberapa uraian dari aspek *reputation* (nama baik) yang dilakukan oleh DSH yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalin hubungan dengan masyarakat secara baik
- b. Menjadi koordinator ambulan se-kabupaten Klaten di luar Rumah Sakit
- c. Penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun di tahun 2020 ini karena terdapat pandemic Virus Corona sehingga mengalami penurunan.

Tabel. 4.2  
Data Penghimpunan Dana

Jenis Dana	Tahun		
	2018	2019	2020(Jan-Agust)
Zakat	Rp. 545.841.500	Rp. 611.513.496	Rp. 450.874.793
Infak Terikat	Rp. 154.515.300	Rp. 339.935.676	Rp. 128.038.450
Infak Tidak Terikat	Rp. 767.102.748	Rp. 696.491.423	Rp. 544.174.373
Program Khusus	Rp. 1.330.258.941	Rp. 1.111.050.330	Rp. 927.828.775
Wakaf	Rp. 194.387.000	Rp. 328.994.923	Rp. 700.395.700

<b>Total</b>	<b>Rp.</b> <b>2.992.105.489</b>	<b>Rp.</b> <b>3.087.985.848</b>	<b>Rp.</b> <b>2.751.312.091</b>
--------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

*Sumber: Dokumentasi DSH Klaten 2020*

Dari tabel diatas bahwa dompet Sejuta harapa (DSH) pada tahun 2018 sampai 2019 mulai dari Zakat, Infaq terikat, dan wakaf mengalami peningkatan, namun di tahun 2020 baik zakat, infaq terikat, infak tidak terikat, program khusus dan wakaf mengalami penurunan sehingga total dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan karena adanya pandami virus corona.

Berikut tabel ringkasan penerapan *Good Amil Governance* di lembaga amil zakat Dompet Sejuta Harapan (DSH) Klaten:

Tabel. 4.3  
Ringkasan Penerapan *Good Amil Governance* di Dompet Sejuta Harapan (DSH) Klaten

No	Instruments	Indicator	Penerapan
1.	<i>Transparancy</i> (Keterbukaan)	Rencana kerja tahunan	Terlaksana
		Laporan keuangan berkala bulanan	Terlaksana
		Laporan keuangan berkala tengah tahunan	Terlaksana
		Laporan keuangan berkala tahunan	Terlaksana
		Sistem akuntansi berbasis teknologi informasi dalam pelaporan kegiatan dann keuangan	Terlaksana

		Laporan keuangan dipublikasikan secara periodik baik di media online maupun media cetak lainnya	Laporan Keuangan di laporkan menggunakan media cetak
	<i>Accountability</i> (Dapat dipertanggungjawabkan)	Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat	Terlaksana
		Koordinasi program kerja	Terlaksana
	<i>Responsibility</i>	Monitoring program kerja atau kegiatan	Terlaksana
		Evalusi program kerja	Terlaksana
		Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan	Terlaksana
		Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan	Terlaksana
		Keterbukaan informasi sesuai regulasi	Terlaksana
		Menerapkan etika, moral, dan akhlak dalam pelayanan	Terlaksana
	<i>Independency</i> (Kemandirian)	Kondisi saling menghormati hak, kewajiban dan tugas masing-masing bidang/devisi	Terlaksana
		Kondisi bahrwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga	Terlaksana
		Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan	Terlaksana
		Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ/devisi dalam lembaga	Terlaksana
		Telah mendapat legalitas hukum	(Masih menunggu dari hasil kemenag)
	<i>Fairness</i> (Keadilan dan kesetaraan)	Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap	Terlaksana



		pengurus/oragan lembaga	
		Keadaan melakukan muzaki dan mustahik secara adil dan jujur	Terlaksana
		Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus	Terlaksana
		Kondisi membolehkan muzaki memberikan masukan sesuai ketentuan	Terlaksana
		Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak yang berkebutuhan	Terlaksana
	<i>Integrity</i> (Kepribadian)	Keterkaitan antar pengurus dan aktivitas dilakukan	Terlaksana
		Meningkatkan kualitas laporan keuangan tentang dana terhimpun, di distribusikan dan di dayagunakan secara lengkap dan terperinci	Terlaksana
	<i>Reliability</i> (Keandalan)	Menyediakan informasi secara akurat dan terpercaya	Terlaksana
	<i>Competance</i> (Kemampuan)	Publikasi informasi perubahan kebijakan lembaga skala umum	Terlaksana
		Mengembangkan komunikasi handal antara lembaga dan muzaki	Terlaksana
		Amil memiliki kecakapan atau kemampuan yang memadai	Terlaksana
		Sumber daya manusia yang profesional dan terampil serta memiliki	Terlaksana

		kompetensi di bidangnya	
	<i>Reputation</i> (Nama Baik)	Menjaga nama baik dengan cara menjalin hubungan baik dengan masyarakat	Terlaksana
		Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang kesadaran berzkat	Terlaksana
		Memperoleh prestari dari berbagai pihak	Terlaksana

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penerapan *Good Amil Governace* di Lembaga Amil Zakat studi pada Dompot Sejuta Harapan (DSH). Berikut kesimpulan dari setiap instrument yang telah dilakukan oleh Dompot Sejuta harapan (DSH) Klaten:

a. Transparansi

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa aspek transparansi telah diterapkan dengan baik sesuai dengan indicator dari aspek transpransi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rencana kerja tahunan, laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan melalui media cetak sebagai salah satu bentuk tanggungjawab Dompot Sejuta Harapan (DSH) kepada donatur.

b. Akuntabilitas

Aspek akuntabilitas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa setiap indikatornya telah dilaksanakan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten. Hal tersebut dibuktikan dengan Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten menyiapkan laporan keuangan secara cepat dan tepat serta melakukan koordinasi program kerja serta adanya sistem kerja yang diatur dalam *Standar Operating Procedure* (SOP) dan melakukan evaluasi.

c. Responsibilitas

Peneliti menyimpulkan bahwa Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten telah melaksanakan aspek responsibilitas sesuai dengan indikator, yaitu keterbukaan informasi yang sesuai dengan regulasi, bermitra dengan masyarakat atau bina lingkungan.

d. Independensi

Aspek independensi yang telah diteapkan oleh Dompot Sejuta Hrapan (DSH) Klaten sesuai dengan indikator dari aspek tersebut namun untuk legalitas secara hukum masih menunggu hasil dari kementrian agama.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Peneliti menyimpulkan untuk aspek kewajaran dan kesetaraan juga sudah diterapkan sesuai dengan indikator seperti memperlakukan muzaki dan mustahik dengan adil dan jujur, membolehkan muzaki memberikan kritikan dan saran kepada Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten.

f. Kepribadian

Aspek kepribadian di Dompot Sejuta Harapan (DSH) sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator, seperti halnya meningkatkan kualitas laporan keuangan tentang dana terhimpun, pendistribusin dan pendayagunaan secara lengkap dan terperinci.

g. Keandalan

Peneliti menyimpulkan bahwa Dompot Sejuta Harapan (DSH) telah menerapkan aspek keadilan sesuai dengan indikator, yaitu dengan menyediakan informasi secara akurat dan terpercaya serta mengembangkan komunikasi yang handal antara lembaga dan muzaki.

#### h. Kemampuan

Aspek kemampuan yang diterapkan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH) sesuai dengan indikator yang ada yaitu dengan memiliki amil yang cakap atau mampu serta sumber daya yang profesional dan terampil dan memiliki kompetensi di bidangnya.

#### i. Reputasi

Penulis menyimpulkan bahwa Dompot Sejuta Harapan (DSH) telah melaksanakan aspek reputasi sesuai dengan indikator yaitu dengan menjaga nama baik dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta memperoleh prestasi dari berbagai pihak.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan satu obyek Lembaga Amil Zakat sehingga mendapatkan hasil yang kurang maksimal dalam penelitian.

### 5.3 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan diantaranya adalah:

#### 1. Pemerintah

Metode analisis dengan menggunakan prinsip *Good Amil Governance* (GAG) dapat menjadi rekomendasi bagi Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat untuk menciptakan tata kelola amil zakat yang baik.

#### 2. Akademisi

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuisioner dan menggunakan obyek lebih dari satu sehingga dalam melakukan pengukuran sebagai pembandingan hasil penelitian.

### 3. Dompet Sejuta Harapan (DSH) Klaten

Penerapan *Good Amil overnance* (GAG) yang sudah diterapkan oleh DSH diharapkan dikembangkan menjadi lebih baik dengan menggunakan aspek-aspek lain yang mendukung untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat umum serta diharapkan menerapkan beberapa prinsip dari *Good Amil Governance* (GAG) yang belum diterapkan maupun belum secara maksimal dalam penerapannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Rachmadian. (2012). Penerapan *Good Corporate Governance* Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Pos Keadilan Peduli Ummat Surabaya).
- Al-Qardhawi, Y. (2004). Manajemen Zakat Profesional, terj. Jasmin dan Faozan. Solo: Media Insani Press.
- Alyani, Atsarina. (2018). Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus di BAZNAS dan Dompot Dhuafa). Volume. IV No 2.
- Chotib, M., Yuswadi, H., Toha, A., & Wahyudi, E. (2018). Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat Institution. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, Volume 7(Issue 1).
- Edastama, P. (2014). Pengaruh Kualitas Service Terhadap Kepuasan, Kepercayaan, dan Kecenderungan Berperilaku Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Jakarta. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, Vol. 7(No.1).
- Endriyana. (2016). Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta). Naskah Publikasi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hasbar, H. M., & Kurnia, N. G. (2016). Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah AKMEN*, Vol. 13(No. 1).
- Hendian. (2016). Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Manajemen Zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung. Skripsi. Universitas Islam Bandung.

- Indahingwati, A. (2019). *Kepuasan Konsumen dan Citra Institusi Kepolisian Pada Kualitas Layanan SIM CORNER di Indonesia*. (F. A. Rahmayani, Ed.). Surabaya: CV.Jakad Publishing Surabaya.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Kuncaraningsih, H. S., & Ridla, M. R. (2015). *Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzaki di Badan Amil Zakat Nasional*. Jurnal MD.
- Kurniasari.Suci Sabriyana.2017.*Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta (Studi Kasus pada BAZ dan LAZ di Yogyakarta)*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Kurniawan, Ahmad.(2014).*Analisis Imolementasi Good Corporate Governance dari Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat (Studi kasus pada BAZNAZ kabupaten Jember)*.Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ooutlok Zakat Indonesia Tahun 2017.
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*. Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan), Volume 3(Nomor 2).
- Prabowo, M. S. (2018). *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perpektif Islam*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 11(No. 2).
- Priyadi, S. F. (2004). *Assessment Centre: Identifikasi, Pengukuran, dan Pengembangan Kompetensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



- Wahjuni dkk. (2019). Analisis Perbandingan Good Corporate Governance BASNAZ dan LAZNAZ. Jurnal Akuntansi. Vol 9 No 2
- Warsono, Sony, & Dkk. (2009). *Corporate Governance Concept and Model*. (Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Ed.). Yogyakarta: Center Of Good Corporate Governance.
- Yulianti, R. T. (2016). Good Corporate Governance di Lembaga Zakat (Cetakan1). Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

**LAMPIRAN**



## LAMPIRAN 2

### Panduan Wawancara

No	Aspek Analisis	Informan	Komponen Aspek Analisis
1.	Transparansi	Bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah laporan keuangan dan laporan pendayagunaan dana di publikasikan kepada donatur/masyarakat umum?</li> <li>2. Media apa saja yang digunakan untuk mempublikasikan laporan tersebut?</li> <li>3. Apakah donatur diberikan informasi terkait dengan penggunaan dana zakat, infaq dan shodaqah secara rutin?</li> </ol>
2.	Akuntabilitas	Bagian Keuangan dan HRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada standar yang mengatur sistem kerja karyawan?</li> <li>2. Apakah setiap kegiatan ada penanggung jawab dan pembagian tugas yang jelas?</li> <li>3. Apakah DSH Klaten sudah memiliki SOP ?</li> </ol>

			<p>4. Apakah standar kinerja yang dilakukan DSH Klaten sesuai dengan SOP yang telah dibuat?</p> <p>5. Dalam pembuatan laporan keuangan, apakah DSH Klaten sudah memenuhi peraturan yang sesuai dalam PSAK No 109?</p> <p>6. Apakah setiap kegiatan (baik itu penghimpunan dana maupun distribusi dana ZIS) selalu ada perencanaan kegiatan?</p> <p>7. Apakah setelah kegiatan dilakukan evaluasi?</p> <p>8. Apakah DSH mempunyai sistem untuk mencegah terjadinya kecurangan, kesalahan pencatatan keuangan dan pencurian aset lembaga?</p>
3.	Responsibilitas	HRD	<p>1. Apakah pengelolaan organisasi sesuai dengan undang-undang?</p> <p>2. Apakah DSH Klaten selalu memegang prinsip kehati-hatian</p>

			<p>dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga? Prinsip kehati-hatian seperti apa yang di terapkan di DSH Klaten?</p> <p>3. Apakah DSH Klaten telah melaksanakan tanggung jawab dari masyarakat? kalau iya, dalam bentuk apa tanggung jawab tersebut?</p>
4.	Independensi	HRD	<p>1. Apakah DSH Klaten mempunyai kriteria tersendiri untuk calon penerima zakat untuk menghindari terjadinya dominasi pihak tertentu?</p> <p>2. Dalam hal pengelolaan dana ZIS, Apakah ada aturan tersendiri atau perundang-undangan yang harus dipatuhi?</p>
5.	Kewajaran dan Kesetaraan	HRD	<p>1. Apakah dalam pembuatan program mengikut sertakan</p>

			<p>para muzaki?</p> <p>2. Apakah DSH Klaten telah melakukan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para muzaki?</p> <p>3. Keadilan dan kesetaraan seperti apa yang di peroleh oleh para muzaki?</p> <p>4. Apakah DSH memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memberikan kritik dan saran? Kalau ada melalui apa?</p>
6.	Integritas	Bagian Keuangan	<p>1. Bagaimana cara DSH meningkatkan kualitas laporan keuangan Lembaga?</p>
7.	Keandalan	HRD	<p>1. Bagaimana cara DSH mempertahankan komunikasi dengan muzaki?</p>
8.	Kompetensi	HRD	<p>1. Bagaimana Proses menjadi seorang amil</p>

			<p>dalam proses recruitment?</p> <p>2. Bagaimana Meningkatkan kuliats amil di DSH Klaten?</p>
9.	Reputasi	HRD	<p>1. Bagaimana cara DSH menjalin hubungan dengan masyarakat untuk menjaga nama baik lembaga?</p>

Informan Direktur :

1. Bagaimana Penerapan Transparansi di Lembaga Pengelola Zakat Dompot Sejuta Harapan?
2. Bagaimana Penerapan Akuntabilitas di Lembaga Pengelola Zakat Dompot Sejuta Harapan?
3. Bagaimana Penerapan Responsibilitas di Lembaga Pengelola Zakat Dompot Sejuta Harapan?
4. Bagaimana Penerapan Independensi di Lembaga Pengelola Zakat Dompot Sejuta Harapan?
5. Bagaimana Penerapan Fairness di Lembaga Pengelola Zakat Dompot Sejuta Harapan ?
6. Bagaimana Penerapan Integritas di Lembaga Pengelola Zakat Dompot Sejuta Harapan?
7. Bagaimana Penerapan Keandalan di Lembaga Pengelola Zakat Dompot Sejuta Harapan?
8. Bagaimana Penerapan Kompetensi atau kemampuan di Lembaga Pengelola Zakat Dompot Sejuta Harapan?
9. Bagaimana Penerapan Reputasi di Lembaga Pengelola Zakat Dompot Sejuta Harapan



## LAMPIRAN 3



SURAT IZIN PENELITIAN  
No. 01/IX/DSH-HRD/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Janu Kurniawan, SE

Jabatan : Direktur Dompot Sejuta Harapan

Memberikan izin kepada:

Nama : Kharisma Apriliyani

NIM : 165221093

Jurusan : Akuntansi Syariah

Universitas : IAIN Surakarta

Untuk melakukan penelitian di lingkungan Dompot Sejuta Harapan dengan Judul Penelitian "Analisis Penerapan Good Corporate Governance di Lembaga Amil Zakat" dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Dompot Sejuta Harapan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan judul penelitian dimaksud;
3. Setelah menyelesaikan penelitian yang dimaksud, supaya menyerahkan hasilnya kepada HRD Dompot Sejuta Harapan;
4. Waktu penelitian adalah **satu bulan** sejak surat ini diterbitkan;
5. Surat izin penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Klaten, 1 September 2020

Direktur Dompot Sejuta Harapan



Janu Kurniawan, SE

**Rekening Donasi**

Bank Syariah Mandiri 037 008 3987 an. dompot sejuta harapan  
Bank Muamalat Indonesia 526 000 4267 an. dompot sejuta harapan  
BNI Syariah 177 002 0103 an. dompot sejuta harapan  
BRI Syariah 103 114 8975 an. dompot sejuta harapan  
BRI 0035 0100 2446 304 an. dompot sejuta harapan

**Kantor Pusat**

Jl. Mayor Kusmanto, Perak YKP  
Gg. Kelapang RT 03/04 (Depan Damkar)  
Ngingas Baru, Barendjor, Klaten Utara,  
Klaten Telp. 0272 - 3392259

**Kantor Cabang Solo**

Pajajaran Barat I No. 48  
RT 02/ RW XVII Sumber  
Kec. Banjarsari, Surakarta 57138  
Telp. 0857 9958 2480

**Kantor Cabang Yogyakarta**

Jl. Lowanu, Gg. Kantil 99A  
RT 21 RW 06 Sorojutan,  
Umbulharjo, Yogyakarta  
Telp. 0857 0000 2406

## LAMPIRAN 4

### Hasil Wawancara

Direktur DSH

Narasumber : Janu Kurniawan SE

Hari/Tanggal : Rabu, 11 November 2020

Tempat : Kantor Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten

Peneliti : “Assalamu’alaikum.”

Narasumber : “Wa’alaikumsalam iya mbak silahkan masuk.” (Sambil mempersilahkan duduk)

Peneliti : “Bismillah, Perkenalkan nama saya Kharisma dari IAIN Surakarta jurusan Akuntansi Syariah, disini saya ingin meneliti terkait Analisis Penerapan *Good Amil Governance* di Lembaga Amil Zakat khususnya di DSH pak.”

Narasumber : Baik mbak, tapi GAG itu ada ya?”

Peneliti : Iya pak, GAG itu hasil desertasi dari yulianti tahun 2016 yang berjudul *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat.”

Narasumber : “Own baik mbak, monggo silahkan.”

Peneliti : “Baik pak, Bagaimana penerapan transparansi di DSH sendiri ?”

Narasumber : “Baik, untuk transparansi kita di setiap bulan itu kita ada laporan keuangan yang di publis lewat majalah orange itu yang pertama, untuk yang kedua untuk menjalankan transparansi setiap enam bulan sekali itu kita ada pengawasan dari Kemenag Klaten itu dia nanti minta laporan keuangan di kita untuk dilihat tasyarufnya kemana aja termasuk misalnya perolehannya itu nama donaturnya siapa, nama muzakinya siapa dan alamatnya dimana itu bagian dari proses transparansi dan kemudian data keuangan kita bisa dilihat oleh stakeholder. Jadi kalau untuk Kemenag setiap enam bulan

sekali buat laporannya kemudian tembusan ke BAZNAS Daerah itu kemudian kalau untuk ke public kita ada laporan keuangan yang kita sajikan walaupun tidak semua, karena tidak semua orang faham tentang neraca atau perubahan keuangan tapi kalau format keuangan yang lengkap ada neraca, perubahan dana dan seterusnya ke Kemenag kabupaten, pusat, BAZNAS dan stakeholder yang membutuhkan dan kita juga baru persiapan untuk audit eksternal dan kemaren kita juga melakukan audit internal.”

Peneliti : “Lalu apakah ada kendala yang di hadapi DSH dalam penerapan transparansi?”

Narasumber : “Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti hanya kita dapat masukan-masukan misalnya dari sisi keseimbangan prosentase, antara operasional dengan pentasyarufan. Dari skalanya Kemenag itu kan maksimal 20% misalnya tapi dari DSH kita di perkenankan sampai 30% ya paling seputaran itu, ya kita sampaikan saja, ya kita lembaganya belum besar sehingga dari sisi prosentase operasional barang kali masih kurang bisa fiks sesuai dengan standar yang ada di kemenag, walaupun standar yang dari kemenag itu bukan standar acuan baku, dia hanya menyebutkan kisaran kurang lebih antara 20% jadi itu bukan suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena di lain di DSN kita masih 30%, saya hanya menyampaikan tentang kapasitas kita.

Peneliti : “Berarti untuk transparansinya hanya dilakukan secara offline nggih maksudnya hanya dengan menggunakan media cetak?”

Narasumber : “ Iya melalui media cetak.”

Peneliti : “ Kalau untuk media online belum nggih?”

Narasumber : “Media online, hemmt karena majalah orange itu juga di upload di media online jadi bisa dilihat disana, tetapi kemudian kita tidak

langsung menyajikan di onlinennya langsung ya, lebih yang dari majalah orange ya kita upload di situ.”

Peneliti : “Lalu kalau untuk penerapan akuntabilitasnya seperti apa ?”

Narasumber : “Dari sisi apanya?”

Peneliti : “Tentang pertanggungjawabannya ke masyarakat.”

Narasumber : “Kemasyarakat biasanya kita mengadakan gathering untuk muzaki sama donatur yang dilakukan setiap setahun sekali, disana kita menyampaikan terkait progress perkembangannya kita, tentunya kita juga mengundang dari perwakilan-perwakilan misal dari pusat. Owh iya untuk transparansi kita juga setiap bulan dimintai data oleh BPS (Badan Pusat Statistik) untuk perkembangan atau progress dari keuangan kita.”

Peneliti : “ Kalau untuk kendalanya sendiri gimana pak ?”

Narasumber : “Akuntabilitas,hmmt ya hampir sama dengan transparansi ya karena kan antara keduanya itu berkesinambungan.”

Peneliti : “ Kalau untuk penerapan Responsibilitasnya seperti apa pak?”

Narasumber : “ Respon terhadap apanya? Di laporan keuangannya atau dimana?”

Peneliti : “Iya di laporan keuangannya pak.”

Narasumber : “Sejauh ini, karena kita ada tranparansi ya untuk responsibilitasnya tidak ada masalah.”

Peneliti : “ Berarti untuk Responsibilitasnya baik-baik saja nggih.”

Narasumber : “ Iya mbak.”

Peneliti : “ Lalu, bagaimana penerapan Independensi di DSH?”

Narasumber : “ Independensinya, karena kita sudah tergabung di FOZ (Forum Organisasi Zakat) kemudian kita juga ketika mengajukan izin ke BAZNAS itu ada syarat-syarat misalnya karyawan itu tercatat ada

SK-nya kemudian juga mengikuti perundang-undangan ketenagakerjaan, harus punya BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan itu juga punya, kemudian ada juga surat keterangan bahwa kita tidak double job dengan lembaga zakat lainnya ya semacam kayak fakta integritas gitu ya. Jadi kalau dari sisi integritasnya termasuk ada dokumen yang di tanda tangani karena yang mewakili adalah pengurus bahwa lembaga kita itu tidak berafiliasi, insyaAllah itu sudah kita penuhi. “

Penulis : “Kalau untuk kendalanya bagaimana pak?”

Narasumber :”ya masih ada beberapa, apa namanya? Gak terlalu banyak kendala sih sebenarnya artinya kita welcome dengan masyarakat misalnya ambulan kita itu kalau di klaten first call untuk semua kalangan masyarakat dan termasuk misalnya orang yang ada di sini itu masyarakat juga bisa faham, tidak membedakan latar belakang antar satu dengan yang lainnya, kemudian juga misalnya ambulan kita first call melayani masyarakat juga begitu welcome itu sudah menjadi bagaimana integritas di masyarakat.”

Peneliti :”Kalau untuk penerapan fairnessnya, tentang keadilan dan juga kesetaraan antara muzaki sama mustahik?”

Narasumber :” Muzaki sama mustahik hmm, setiap kemudian kita ada program-program tentang pentasyarupan kita juga share ke masyarakat kemudian kita juga melibatkan muzaki untuk bisa terlibat misalnya ada program-program seperti baksos itu bisa ikut kesana mungkin lebih cenderung dari sisi pentasyarufan misalnya skala-skalanya fakir miskin berapa gharimin berapa dan seterusnya kita lakukan bahkan kita mengcover itu sudah dari kaidah misalnya acuan dari kemenag disisi itu kita dapet B dari semua unsur. Delapan asnaf itu bisa tercover dengan secara proporsional tidak hanya sekedar fakir miskin aja, ghorimin gak ada gitu, jadi kita lebih cenderung merata

dari 8 asnaf kecuali yang budak nggih, karena sudah tidak ada di zaman kita sekarang, kemudian untuk standar yang dengan amil kita melakukan standarnya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.”

Peneliti : “Tapi yang sering mendapatkan zakatnya itu dari golongan mana?”

Narasumber : “Kita di 26 kecamatan merata di klaten kemudian tadi karena kita punya duta di masing-masing kecamatan, begitu kita ada program kita share juga ke mereka untuk kemudian masyarakat mudah untuk mengakses jadi kemudian siapapun selama kemudian memenuhi ketentuan syaratnya misalnya untuk zakat yang misalnya program beras untuk jompo dan janda dan dhuafa itu kita sampaikan di setiap jaringan kita kemudian dari tim survey mereka mencantumkan KTP, KK dan surat rekomendasi dari takmir atau RT itu sudah merata, jadi itu terbuka jadi setiap ada program kita share ke mereka, mereka mengakses sesuai dengan kuota yang sudah di tentukan misalnya berapa gitu, misalnya ada program khitan itu juga di akses oleh masyarakat, mereka ada yang mendaftar langsung ke DSh adanya via online dan juga yang melalui duta atau lewat PKH-PKH jadi artinya semua bisa mengakses kita, terutama ambulankan kita di klaten tersedia dua ambulan hampir 24 jam, dari sehari itu kira-kira antara 4-5 perhari sebelum itu bisa sampai 9-10 bisa dibayangkan ketika kita msaih punya satu ambulance, setiap hari hampir rata-rata ada tiga complen dari masyarakat ada yang merasa dia kita tidak bisa layani padahal dari data ambulan kita itu setiap hari itu kita sudah melayani 7 sampai 9, itu catatannya berangkat dari sebelum subuh ngantar itu sekitar jam sebelas bahkan kalau itu misalnya sekitar jam 1 atau 2 darurat ada yang meninggal atau keadaan darurat kita juga masih bisa melayani, namun karena sekarang kita sudah

punya ambulan dua sehingga bisa melayani sekitar 4 sampai 5 per ambulan.”

Penulis : “Lalu apakah DSH selalu memegang prinsip ke hati-hatian ya pak.”

Narasumber : “Owh iya, misalnya program-program tadi ya mbak setiap kemudian pentasyarufkan itu kita mensyaratkan ada fotocopy KTP, KK dan surat rekomendasi dari takmir atau dari RT itu yang pertama. Misalkan untuk program-program kayak baksos kita lakukan suver, trus program qurban kita lakukan survey, kemudian kita mau mentasyarufkan ke lokasi mana itu kita lakukan survey terlebih dahulu, disitu kondisinya seperti apa, KK-nya berapa jadi kita memperoleh datanya demografi. Misalnya ada bantuan pengajuan untuk kursi roda yang kita datang kelokasi, bahkan kita sering kali menemukan ada sisi-sisi lain yang perlu dibantu kebutuhan awalnya dia butuh kursi roda kita lihat ternyata perekonomiannya memprihatinkan kemudian nanti kita bantu dengan program pemberdayaan ekonomi, jadi itu untuk proses kehati-hatian di DSH ya sisi lain kita ada kerjasama dengan PKH atau dengan instansi tertentu bisa kerjasama dengan takmir jadi disitu ada proses selektif itu berartikan apa namanya yang akan terlibat diproses pentasyarufan kita adalah jamaahnya, takmir sudah akan bisa memilih.”

Peneliti : “Dari DSH juga apakah menerima saran dan juga kritikan dari masyarakat?”

Narasumber : “Owh iya, jadi kita terbuka, kita ada group untuk para donatur, setiap tim partnership membuat group dengan para donaturnya nah di situ para donatur bisa memberikan masukan dan juga kritikan kepada DSH, kadang-kadang kita juga dapat usulan-usulan dari para donatur terkait program kerja, dimulai akhir tahun 2019 ada program jum’at berkah itu berawal dari masukan beberapa donatur

yang punya warung soto atau apa jadi itu sebagai penyaluran sedekah produknya, hanya pengennya mereka tepat sasaran, kan sudah banyak nih yang mengadakan agenda tersebut jadi kita melakukan jum'at berkah di masjid-masjid plosok, itu bahkan nanti yang punya warung ikut ke lokai jadi dia tau persis lokasinya dimana, kita biasanya punya jejaring lewat duta-duta tadi ya di masing-masing kecamatan itu punya informasi, jadi kita tinggal menjadwalkan dan juga ada gabungan dari komunitas-komunitas, kita juga sangat terbuka untuk program-program dalam teknis adanya yang tidak nyaman ya mereka memberikan masukannya.”

Peneliti : “ Kalau untuk kendalanya bagaimana?”

Narasumber : “Alhamdulillah lancar, maksudnya tidak ada kendala yang berarti.”

Peneliti : “Kalau untuk penerapan integritasnya seperti apa pak?”

Narasumber : “Tadi sudah kita ada fakta integritas ya, kita juga ada evaluasi pengawasan dari kemenag dari BAZNAS jadi kalau misalnya dari cerita yang ada ya kita sudah sinergi dengan PDM, PCNU, kita sudah sinergi BAZNAS dengan Kemenag, komunitas-komunitas yang ada, program-program muharrom ceria sudah berjalan tiga tahunan, yaitu barang kalai dari sisi yang mereka gak akan mungkin sembarangan, mungkin dari sisi akuntabilitas, transparansi, dari sisi integritas insyaAllah sudah memenuhilah, jadi kalau untuk studi kita kasih kelonggaran karena itu sebagai salah satu untuk meningkatkan kualitas SDM di DSH.”

Peneliti : “Berarti untuk integritas tidak ada kendalanya ya pak berjalan dengan lancar-lancar?”

Narasumber : “hemt iya, ya tidak ada kendala yang berarti maksudnya dari masyarakat dengan kehadiran DSH mereka menerima dengan baik kemudian dari kabupaten klaten DSH menjadi salah satunya asset



lembaga zakat yang dimiliki oleh kabupaten klaten yang dilihat misal dari data statistik punya LAZ yang terdaftar ya hanya DSH ya walaupun teman-teman tau ada LAZ NU, LAZIZMU, Solopedulmi misalnya mereka itu kan status badan hukumnya nasional sementara kalau yang izinnya kabupaten klaten itu sementara itu baru kita. Dari kemenag juga merespon dengan baik ikut memberikan pengawasan, masukan, bahkan proses-proses pengajuan izin dibantu untuk komunikasi dikasih dalam tanda kutip kelonggaran yang secara procedural, kemudian dengan BAZNAS kita juga bersinergi bareng.”

Peneliti :”Kalau untuk penerapan keandalannya sendiri di DSH bagaimana?”

Narsumber :” Keandalannya, hemt apa ya?”

Peneliti :”Mungkin bisa terkait dengan komunikasi dengan para donatur dan juga masyarakat?”

Narsumber :”Itu, saya kira karena tadi kita terbuka dan bisa mengakses lewat media online dan juga offline itu juga yang paling diandalkan program yang paling andal ya adalah ambulan dan juga itu langsung ke droping air bersih, jadi itu langsung ke drivernya. Kemudian kita juga ada pondok yatim penghafal Qur'an, saya kira sekarang juga muhammadiyah masyarakat bisa mengakses penuh, selalu ada sinergi setiap tahunnya. Ketika kita melakukan sebuah program kerja selalu ada instansi yang bersinergi dengan kita , kejaksaan, intan sejati RSI dan lain sebagainya. Ya itu sudah termasuk program kerja yang andal ya, dapat diandalkan. Para masyarakat juga sudah hafal dengan program kerja yang dilaksanakan dengan DSH.

Peneliti :”Lalu bagaimana penerapan kemampuan di DSH.?”

Narasumber : "Kemampuan, kita selalu ada upgrade kemampuan SDM, mulai yang dari setiap divisi juga ada yang tentang manajemen dari para amilnya, jadi ketika ada open recruitment pengurus amil itu saat mereka sudah deal dengan kita maka, kita akan kasih arahan dan juga monev terkait visi misi dan lain-lain, meyakinkan bahwa bekerja di lembaga zakat bukan berarti tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Faktanya kita temukan bahwa yang bekerja di amil zakat pun bisa menjadi orang sukses, mimpi-mimpi mereka pun juga tercapai. Semua SDM disini untuk BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan itu kita punya dan bahkan dari pihak kita juga ada pelatihan untuk para amil baru. Nah untuk masa pandemic kali ini kita setiap pekan hari rabu malam ada meeting zoom dengan kegiatan sosiltalk se Indonesia nanti dari sana kita transfer ilmunya ke pengurus yang lainnya karena kadang-kadang berkaitan dengan ilmu partnership, keuangan dan lain sebagainya dan seringkali setiap satu bulan sekali kita ada zoom bareng. Lalu setiap dua pekan sekali kita ada kajian untuk mengasah ruqiyah dan juga pemahaman terhadap syariahnya, untuk fiqh zakat kita agendakan secara berkala setahun 2 kali updatetannya, dan saya selalu memberikan kesempatan untuk terus belajar.

Penulis : "Lalu bagaimana DSH menjaga nama baik dengan masyarakat umum?"

Narasumber : "Kita dimulai dari Ambulan yang cukup mengangkat nama baik lembaga dan termasuk program DSH pertamakali, karena visinya DSH itu menjadi lembaga yang unggul dan mengakar di masyarakat, nah kita ingin program-program yang kita adakan bisa diterima dan diandalkan tadi oleh masyarakat, nah misalnya ambulan sejak awal kita setting ingin menjadikan ambulan kita itu first call, kita pengen punya kesan setiap orang klaten yang pertama kali di telfon adalah DSH, nah sejak awal kemunculan ambulan ini

awalnya tidak respek bahkan pada saat itu si driver mencari layanan satu saja susah, satu bulan iyu seperti menganggur, sampai kita buat penawaran menunggu di rumah Sakit bahwa kita membuka layanan gratis bahkan sampai tidak boleh menerima apapun, sampai dapet beberapa masukan bahwa kita dari pihak masyarakat juga menginginkan untuk memberi makanan dan lain-lain kepada drivernya masak tidak diperbolehkan, lalu sekarang jika ada pihak masyarakat yang memberi sesuatu kepada driver itu adalah jika memang sedekah. Sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat sampai sekarang ini, hanya sekitar 3 tahunan lah ya sekarang kita sudah menjadi fist call bahkan sampai overload, pada tahun 2016 kita buat proposal kita nanmba ambulan dengan pos 1 Solo, 1 Yogya dan 2 Klaten. Jadi ketika kita fist call itu ketika orang kontak ke kita kemudian kita sedang ada layanan kemudian kita melakukan proses untuk agar kita bisa melayani kita carikan ambulan yang lainnya, jadi kita semacam garansi, kita membuat jaringan, kemudian driver kita dijadikan koordinator ambulan se-Klaten, kecuali yang RS ya. Nah itu yang cukup bisa menaikkan reputasi DSH.

Peneliti :”Kalau untuk pengendalian internalnya di DSH sendiri bagaimana pak?”

Narasumber :”Hemmt, pengendalian internal kemaren kita sudah ada bagian akuntansi sendiri, keuangan sendiri. Jadi kalau mau mengeluarkan uang itu harus ada tanda tangan manager, pengaju, keuangan sehingga masih bisa terkontrol.Nah kita juga akan mengadakan audit eksternal di tahun ini, dan setiap aktivitas atau program kerja ada berita acaranya” (sambil menunjukan kwitansi pengeluaran uang dan laporan pertanggungjawaban serta laporan keuangannya)

Peneliti :”Baik, sebelumnya terimakasih Pak sudah menyediakan waktu untuk diwawancari, saya pamit dulu nggih, Assalamu’alaikum.”

## LAMPIRAN 5

HRD DSH

Narasumber : Zaky Mubarrok

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2020

Tempat : Kantor Dompot Sejuta Harapan (DSH)

Penulis : “Assalamu’alaikum Pak .”

Narsumber : “Wa’alaikumsalam iya mbak silahkan masuk .” (Sambil mempersilahkan duduk)

Penulis : “Bismillah, langsung saja nggih pak.”

Narasumber : “Iya silahkan.”

Peneliti : “Apakah ada standar yang mengatur tentang sistem kerja karyawan di DSH ini?”

Narsumber : “Iya ada.”

Peneliti : “Iya lalu itu sistemnya bagaimana?”

Narsumber : “Kamikan ada SOP untuk setiap devisi khususnya nanti di program sama pengambilan donasi misalkan untuk program yang jalan terus itu ada SOP-nya, ada berita acaranya ada laporannya, kalau untuk pengambilan donasi harus mendo’akan bagaimana harus senyum kepada donatur dan bla bla bla .”

Peneliti : “Boleh nanti saya lihat SOP-nya ?”

Narsumber : “Owh boleh, silahkan, tapi untuk berkasnya ada di lantai atas.”

Peneliti : “Nanti aja setelah selesai pak. Lalu apakah setiap selesai kegiatan ada penanggungjawabnya dan pembagian tugas yang jelas?”

Narasumber :”Ada, jadi setiap program kita selalu ada penanggungjawabnya kan nanti controllingnya akan sulit ketika direktur ataupun HRD mau menanyakan terkait program.”

Peneliti :” Berarti untuk system kinerja di DSH ini sesuai dengan SOP ya?”

Narasumber :” Iya. Cuma nanti untuk prosesnya bervariasi.”

Peneliti :” jadi setelah kegiatan berlangsung ada evaluasinya nggih?”

Narasumber :”Iya, jadi setiap selesai kegiatan diakan evaluasi dan itu juga tergantung pada lingkup program kerjanya misalkan kalau untuk ramadhan kan besar jadi untuk evaluasinya juga ada dan melibatkan beberapa orang dan hasil evaluasinya juga di lampirkan di laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan kalau untuk ambulan itu evaluasinya hanya dilingkup devisinya.”

Peneliti :”Apakah dari DSH mempunyai system untuk mencegah terjadinya kecurangan, kesalahan pencatatan dan pencurian asset lembaga?”

Narasumber :”Kalau untuk pencurian asset lembaga kami divisi perumahan, dari divisi ini yang melakukan controlling, meskipun begitu dari masing-masing divisi juga memiliki gudang sendiri walaupun yang memegang dari managernya sendiri jadi untuk akses masuknya sendiripun harus lewat manager terlebih dahulu selain itu juga ada program sedekah subuh nah itupun juga ada laporannya.”

Peneliti :”Apakah pengelolaan organisasi sesuai dengan undang-undang ?”

Narasumber :”Undang-Undang, kita pakai Undang-Undang No 13 Tahun 2003, undang-undang ketenagakerjaan, seluruh karyawan kita beri, terkait cuti, dan lain sebagainya trus BPJS ketenagakerjaan, Cuma kalau nanti undang-undang cipta kerja memang diterapkan ya mau gak mau kita juga akan menerapkan itu, namun kita akan berusaha

menjadi lebih baik, ya secara umum kita di lembaga sosial ya juga harus memahami keadaan.”

Peneliti :”Lalu apakah DSH telah melaksanakan tanggungjawab dari masyarakat? Kalau iya biasanya dalam bentuk apa tanggungjawab tersebut?”

Narasumber :”yang jelas kitakan ada program juga, nah kita melaporkan itu baik di media sosial maupun di majalah, apalagi yang program-program khusus seperti muharrom ceria, pada dasarnya kalau ada donasi masuk kita segera salurkan.”

Peneliti :”Lalu apakh dalam pembuatan program kerja para muzaki ikut serta atau bagaimana?”

Narasumber :”Yang jelas ketika kita membuat program kerja salah satu pertimbangannya adalah untuk bagaimana, kan muzaki sering memberikn saran, dan kitakan juga punya group WA dengan para muzaki kadang-kadang juga ngasih saran lewat group itu, dalam melakukan donasi itu kita juga adakan survey, kita tidak melulu membuat program kerja selalu melibatkan muzaki.”

Peneliti :” Apakah DSH sudah menerapkan keadilan dan kesetaraan dalam mematuhi hak?”

Narasumber :”Muzaki itukan selalu kita berikan laporan keuangan, nah ketika mereka melakukan donasi ke DSH kita berikan informasi via WA bahwa donasi mereka telah masuk, karena apa namanya sebagai jaminan bahwa o donasi saya sudah masuk, gak ada yang dikurangi dan lain sebagainya kita berusaha menjaga kepercayaan dengan muzaki salah satu caranya yaitu dengan melakukan sms atau WA bulanan, ehh setiap mereka donasi, ketika memang mereka butuh ya kita juga akan berikan seperti itu.”

Peneliti :”Kalau di DSH prosesnya menjadi seorang amil itu bagaimana?”

Narasumber :”Mau, jadi sebenarnya untuk menjadi seorang amil adalah kemauan karena seperti yang jenengan tau bahwa orang yang bergerak dibidang sosial itu belum banyak, sehingga yang selalu kita tekan mereka mau dulu.”

Peneliti :”Lalu bagaimana caranya DSH menjalin hubungan dengan masyarakat untuk menjaga nama baik lembaga?”

Narasumber :”kita selalu berusaha dekat dengan masyarakat khususnya masyarakat sekitar kantor, DSH Alhamdulillah sudah diamanahi sebagai pemateri pemuda rutin di masjid setiap kamis malam, setiap jum’atan kita juga dimintain tolong trus pas hari rasa besar kemaren DSH juga dimintai tolong untuk membantu.”

Peneliti :” Baik, Terimakasih pak atas waktu dan juga kesempatannnya, ini sudah selesai.”

Narasumber :” Iya sama-sama mbak, owh iya SOP-nya tak ambilkan dulu ya”

Peneliti :”Baik pak.”

Setelah beberapa menit pak Zaky datang dan memebrikan SOP yang dibutuhkan penulis dalam bentuk Softfile.

## LAMPIRAN 6

### Bagian Keuangan

Narasumber : Latifah Nur Baiti, S. Akun

Hari/tanggal : Rabu, 11 November 2020

Tempat : Kantor Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten

Peneliti : " Assalamu'alaikum, mbak Ifah langsung saja nggih?"

Narasumber : " Wa'alaikumsalam, iya silahkan."

Peneliti : "Jadi untuk pertanyaan pertama apakah laporan keuangan dan laporan pendayagunaan di publikasikan secara umum di masyarakat?"

Narasumber : "Kalau di DSH ini sih masih dipublikasinya lewat majalah jadi kalau yang untuk publikasi di internet luas itu belum, jadi laporan keuangannya hanya di publikasikan lewat majalah, nah untuk masyarakat yang melakukan donasi ke DSH maka akan di kasih majalah."

Peneliti : " Nah misalnya saya ini masyarakat umum dan belum tau mengenai DSH dan belum pernah melakukan donasi lewat DSH, lalu bagaimana saya bisa mengetahui bahwa DSH itu melakukan transparansi laporan keuangannya sedangkan ketika saya cari lewat web resmi DSH belum ada?"

Narasumber : " Karena kita baru mengakses via majalah

Peneliti : "Media apa saja yang digunakan untuk mempublikasikan laporan keuangan?"

Narasumber : "Baru menggunakan media cetak yaitu dengan adanya majalah orange."



Peneliti : "Apakah donatur di berikan informasi terkait penggunaan dana zakat?"

Narasumber : "Jadi untuk segala informasi itu bisa di lihat di majalah DSH karena segala informasi terkait pendayagunaan zakat di publikasikan disana."

Peneliti : "Nah kalau semisal dari DSH belum sempat memberikan majalah ke donatur lalu bagaimana DSH memberikan haknya tersebut?"

Narasumber : "Kalau sejauh yang aku tau, tidak semua masyarakat membutuhkan laporan dari dana mereka yang sudah di berikan ke DSH, mungkin hanya para orang-orang tertentu yang membutuhkan."

Peneliti : "Dalam pembuatan laporan keuangan apakah DSH sudah menerapkan aturan PSAK 109?"

Narasumber : "Nah kalau di DSH itu menggunakannya sistem dan sistem yang digunakan dsh adalah SIDSH, sebenarnya itu sudah mau ganti tapi belum final."

Peneliti : "Lalu bagaimana cara DSH meningkatkan laporan keuangan?"

Narasumber : "Iya kita juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu rencananya akan dengan pembaruan sistem kita mau ke balace, nah itu seperti lembaga zakat tapi punya PT, jadinya dia juga faham terkait akuntansi jadi akan lebih mudah."

Peneliti : "Lalu isinya SIDSH itu apa mbak? Apa seperti neraca dan lain-lain?"

Narasumber : "Iya, jadi kemaren itu apaya kesalahan sistemnya kyaknya nah itu tidak bisa di akses."

Peneliti : "Owh baik mbak."

Narasumber : "Ada yang mau ditanyakan lagi?"

Peneliti : "Boleh saya minta laporan keuangan dan hasil penghimpunan dana selama tiga tahun?"

Narasumber : "Boleh." (Sambil menyodorkan majalah DSH)

Peneliti : "Mungkin itu dulu saja mbak, terimakasih atas waktunya."

Narasumber : "Iya mbak."

Peneliti : "Mari mbak, Assalamu'alaikum."

Narasumber : "iya, Wa'alaikumsalam."

## LAMPIRAN 7

### STANDARD OPERASIONAL PELAYANAN PRIMA

#### FO/ADMINISTRASI

##### Pelayanan Prima pada Tamu

1. Berdiri dengan antusias, mata berbinar
2. Senyuman tulus minimal  $\pm 3$  detik, dengan dimensi kekiri dan kekanan masing-masing  $\pm 1$  cm
3. Satukan telapak tangan dan letakkan di dada
4. Ucapkan salam “Assalamu’alaikum saya “fulan/fulanah”, “silahkan duduk”
5. Mempersilahkan tamu untuk duduk
6. Tanyakan nama,alamat : maaf dengan bpk/ibu siapa?, dari mana? “ada yang bisa saya bantu”
7. Lakukan layanan dengan baik dan ramah
8. Sebutkan nama tamu setiap kali mengkonfirmasi sesuatu
9. Serahkan rangkap kuitansi tamu “ini bapak/ibu kuitansinya”
10. Mengucapkan terimakasih dan mendo’akan  
Terima kasih bapak/ibu atas kepercayaannya,kami turut berdoa, lalu berdo’a
11. *Taawudz dan Basmalah seraya “Ajarokalloohu fiimaa a’thoita waja’alahu laka thohuuron wa baaroka laka fiimaa abqoita”  
“Ya Allah, limpahkanlah pahala kepada Bpk/Ibu... atas apa yang telah beliau berikan. Jadikanlah sebagai pembersih hartanya, serta limpahkanlah keberkahan pada apa yang masih beliau simpan”.*
12. Tawarkan bantuan yang lain setelah pelayanan dilakukan “masih ada yang dapat kami bantu, pak/bu”
13. Memberikan informasi program
14. Ucapkan Terima kasih: “Terima kasih”
15. Berdiri, telapak tangan didada seperti point 3, seraya salam,  
Assalamu’alaikum wr wb”

##### Pelayanan Prima pada Saat Menerima Telephone

1. Tersenyum dan tunjukan sikap antusias terlebih dahulu
2. Angkat telepon secara perlahan maksimal sebelum 3 kali dering
3. Ucapkan pembuka: “Assalamu’alaikum dengan “fulan/fulanah”, DSH ada yang bisa saya bantu”

4. Tanyakan nama dan alamat : “maaf,Dengan Bapak/ Ibu siapa ? dari mana?”
5. Dengarkan dengan seksama, persiapkan catatan
6. Memberikan solusi
7. Berikan ucapan “Magic Words” : Maaf, bolehkah,terima kasih,  
\* jika Butuh keterangan lbh lanjut dari bagian lain
8. “Maaf bpk/ibu, kami panggilkan/ hubungkan dengan Bagian .....Pak/  
Bu. ...., mohon tunggu sebentar. Menekan nada tunggu
  - Bagi bagian yang dimaksud langsung mengucapkan salam
9. Assalamu’alaikum dengan fulan/fulanah ada yang bisa kami bantu?
10. Tawarkan bantuan yang lain setelah pelayanan dilakukan “masih ada yang dapat kami bantu, pak/bu.. ”
11. Ucapkan terimakasih dan salam : “Terima kasih, Wa’alaikumusalam”
12. Tutup setelah penelepon benar-benar menutup telepon
13. Letakkan gagang telpon secara perlahan dengan benar

#### **Pelayanan Prima pada Saat Menelephon**

1. Tersenyum dan tunjukan sikap antusias terlebih dahulu
2. Ucapkan pembuka: “Assalamualaikum, dengan bpk/ibu, saya fulan/fulanah, DSH.
3. Lakukan komunikasi dengan penuh simpati
4. Berikan ucapan “Magic Words” : Maaf, bolehkah,terima kasih
5. Ucapkan terimakasih dan salam : “Terima kasih, Assalamu’alaikum warahmatullah”
6. Letakkan gagang telpon secara perlahan dengan benar

### **STANDARD OPERASIONAL PELAYANAN PRIMA**

#### **MARKETING & DUTA**

##### **Pelayanan Prima pada Saat Berkunjung**

1. Pastikan pakaian, penampilan rapih terlebih dahulu
2. Pastikan kendaraan anda bersih
3. Parkirkan kendaraan pada tempat yang benar-benar tidak akan mengganggu atau di tempat parkir yang disediakan
4. Tersenyum dan tunjukan sikap antusias terlebih dahulu
5. Perhatikan lantai apabila harus melepas sepatu
6. Ketuk pintu enam ketukan dengan ketukan 1/1 dengan nada khas DSH
7. Ucapkan salam: “Assalamualaikum”
8. Tunggu jawaban dengan lama maksimal 10 detik

9. Ulangi salam maksimal 3 kali apabila belum mendapat jawaban, lalu tinggalkan tempat dengan penuh bersahaja
10. Tunjukkan antusiasme, keramahan dan menjaga kesopanan selama berinteraksi
11. Lakukan pelayanan semaksimal dan seprima mungkin.
12. Berikan ucapan “Magic Words” : Maaf, bolehkah, terima kasih
13. Sampaikan informasi dan perkembangan terbaru
14. Serahkan rangkap kuitansi, majalah tamu “ini bapak/ibu kuitansinya”
15. *Taawudz dan Basmalah seraya “Ajarokalloohu fiimaa a'thoita waja'alahu laka thohuuron wa baaroka laka fiimaa abqoita”  
“Ya Allah, limpahkanlah pahala kepada Bpk/Ibu... atas apa yang telah beliau berikan. Jadikanlah sebagai pembersih hartanya, serta limpahkanlah keberkahan pada apa yang masih beliau simpan”.*
16. Ucapkan terimakasih dan mohon pamit : “Terima kasih, mohon maaf kami pamit dulu”
17. Ucapkan salam “Assalamu’alaikum
18. Tinggalkan tempat dengan tenang, dan tersenyum
19. Tuntun kendaraan sampai ke jalan, hidupkan kendaraan dan jalankan dengan perlahan terlebih dahulu.


### **Pelayanan Prima pada Saat Menerima Telephon**

14. Tersenyum dan tunjukkan sikap antusias terlebih dahulu
15. Angkat telepon secara perlahan maksimal sebelum 3 kali dering
16. Ucapkan pembuka: “Assalamu’alaikum dengan “fulan/fulanah”, DSH ada yang bisa saya bantu”
17. Tanyakan nama dan alamat : “maaf, Dengan Bapak/ Ibu siapa ? dari mana?”
18. Dengarkan dengan seksama, persiapkan catatan
19. Memberikan solusi
20. Berikan ucapan “Magic Words” : Maaf, bolehkah, terima kasih,  
\* jika Butuh keterangan lbh lanjut dari bagian lain
21. “Maaf bpk/ibu, kami panggilkan/ hubungkan dengan Bagian .....Pak/ Bu. ...., mohon tunggu sebentar. Menekan nada tunggu Bagi bagian yang dimaksud langsung mengucapkan salam
22. Assalamu’alaikum dengan fulan/fulanah ada yang bisa kami bantu?
23. Tawarkan bantuan yang lain setelah pelayanan dilakukan “masih ada yang dapat kami bantu, pak/bu..”
24. Ucapkan terimakasih dan salam : “Terima kasih, Wa’alaikumusalam”
25. Tutup setelah penelepon benar-benar menutup telepon
26. Letakkan gagang telpon secara perlahan dengan benar

**Pelayanan Prima pada Saat Menelephon**

1. Tersenyum dan tunjukan sikap antusias terlebih dahulu
2. Ucapkan pembuka: “Assalamualaikum, dengan bpk/ibu, saya fulan/fulanah, DSH.
3. Lakukan komunikasi dengan penuh simpati
4. Berikan ucapan “Magic Words” : Maaf, bolehkah, terima kasih
5. Ucapkan terimakasih dan salam : “Terima kasih, Assalamu’alaikum warahmatullah”
6. Letakkan gagang telpon secara perlahan dengan benar.

## LAMPIRAN 8

 <b>Penerima Manfaat</b> Agustus 2020	
<b>Zakat</b>	
<b>Penerimaan</b>	<b>Penyaluran</b>
Penerimaan Zakat Individu	Fakir Miskin
Penerimaan Zakat Entitas	Amil
Penerimaan Auto Zakat	Ibnu Sabil
Penerimaan Zakat Fitrah	Mualaf
<b>Total Penerimaan Dana Zakat</b>	Aqab
	Gharimin
	Fi Sabilillah
	Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan (Zakat)
	<b>Total Penyaluran Dana Zakat</b>
<b>Infaq / Shadaqah</b>	
<b>Penerimaan</b>	<b>Penyaluran</b>
Penerimaan Infaq/Shadaqah Tidak Terikat	Penyaluran Infaq/Shadaqah Tidak Terikat
Penerimaan Infaq/Shadaqah Terikat	Penyaluran Infaq/Shadaqah Terikat
Penerimaan Infaq Barang	Penyaluran Infaq Barang
<b>Total Penerimaan Dana Infaq / Shadaqah</b>	<b>Total Penyaluran Dana Infaq / Shadaqah</b>
<b>Wakaf dan Fidyah</b>	
<b>Penerimaan</b>	<b>Penyaluran</b>
Penerimaan Wakaf & Infaq Masjid	Penyaluran Wakaf dan Infaq Masjid
Penerimaan Wakaf Buku	Penyaluran Wakaf Buku
Penerimaan Wakaf Pesantren	Penyaluran Wakaf Pesantren
Penerimaan Wakaf Lainnya	Penyaluran Wakaf Lainnya
Penerimaan Wakaf Fidyah	Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan (Wakaf)
<b>Total Penerimaan Dana Wakaf dan Fidyah</b>	Penyaluran Fidyah
	<b>Total Penyaluran Dana Wakaf dan Fidyah</b>
<b>Program Khusus</b>	
<b>Penerimaan</b>	<b>Penyaluran</b>
Penerimaan Jasa Giro/Bunga Bank	Geser
Geser	Fasilitas Umum/Sosial
Penerimaan Non Halal Lainnya	Penyaluran Peduli Kemanusiaan
Penerimaan Kemanusiaan	Penyaluran Tiltan Qurban
Tiltan Qurban	Khitan Ceria
Senyum Ramadhan	Qurban Sedekat Hati
Khitan Ceria	Penyaluran Aqiqah
Qurban Sedekat Hati	Penyaluran Rubaiyat
Muharram Ceria	Senyum Ramadhan
Rubaiyat	Muharram Ceria
Aqiqah	<b>Total Penyaluran Dana Program Khusus</b>
<b>Total Penerimaan Dana Program Khusus</b>	

## LAMPIRAN 9

### SK. Penetapan Sebagai Anggota Forum Organisasi Zakat (FOZ)






**LAMPIRAN 10**





## LAMPIRAN 11



SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  
No. 01/XII/DSH-HRD/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaky Mubarak, S. Sos

Jabatan : HRD Dompet Sejuta Harapan

Memberikan izin kepada:

Nama : Kharisma Apriliyani

NIM : 165221093


Jurusan : Akuntansi Syariah

Universitas : IAIN Surakarta

Telah melaksanakan penelitian di lingkungan Dompet Sejuta Harapan untuk kepentingan skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Good Corporate Governance di Lembaga Amil Zakat".

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Klaten, 1 Desember 2020



Dompet Sejuta Harapan  
HRD Dompet Sejuta Harapan

Zaky Mubarak, S. Sos

**LAMPIRAN 12****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : KHARISMA APRILIYANI

TTL : Klaten, 10 April 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

HP : 0858-6518-9842

Email : [kharismaapriyani98@gmail.com](mailto:kharismaapriyani98@gmail.com)

Alamat : Daratan 01/02 Sukorejo Kec. Wedi Kab. Klaten Prov.

Jawa Tengah

**PENDIDIKAN:**

1.	TK Aisyah Canan Wedi	2002-2004
2.	SD N 02 Birit Wedi Klaten	2004-2010
3.	MTS N Gantiwarno	2010-2013
4.	MA N Klaten	2013-2016
5.	Institut Agama Islam Negeri Surakarta	2016-2020